

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Ahli Instrumen

A. Instrumen Keterampilan Berpikir Kritis

Tabel 1. Hasil Uji Ahli Instrumen 1

No.	Soal	Relevan	Tidak Relevan
1.	Bagaimana Negara menambah kekurangan target pajak?	√	
2.	Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah agar penerimaan APBN dari pajak dapat tercapai?	√	
3.	Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak, baik yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak. Rumuskanlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak!	√	
4.	Pak Ramon adalah seorang wajib pajak yang memiliki seorang istri dan dua orang anak. Istri Pak Ramon bekerja disebuah perusahaan. Penghasilan istri Pak Ramon harus digabung dengan penghasilan Pak Ramon. Berapa besarnya PTKP Pak Ramon?	√	
5.	Objek pajak dari PBB adalah bumi dan bangunan. Uraikan kriteria objek pajak yang tidak dikenakan PBB!	√	
6.	Jelaskan tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)!	√	
7.	Wajib pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana mereka mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan	√	

	peraturan perundang-undangan perpajakan. Simpulkan kewajiban seorang wajib pajak!		
8.	Rumuskanlah tentang sengketa pajak dan hal-hal apa sajakah yang disengketakan?	√	
9.	Sebutkan objek pajak dari PPN dan PPnBM menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah!	√	
10.	Selain barang, jasa juga dikenai pajak. Sama dengan barang, semua jasa sebenarnya adalah Jasa Kena Pajak (JKP), akan tetapi terdapat beberapa jasa yang tidak tergolong dalam JKP. Rumuskan jasa yang tidak tergolong dalam JKP!	√	

Tabel 2. Hasil Uji Ahli Instrumen 2

No.	Soal	Relevan	Tidak Relevan
1.	Bagaimana Negara menambah kekurangan target pajak?	√	
2.	Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah agar penerimaan APBN dari pajak dapat tercapai?	√	
3.	Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak, baik yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak. Rumuskanlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak!	√	
4.	Pak Ramon adalah seorang wajib pajak yang memiliki seorang istri dan dua orang anak. Istri Pak Ramon bekerja disebuah perusahaan. Penghasilan istri Pak Ramon harus digabung dengan penghasilan Pak Ramon. Berapa besarnya PTKP Pak Ramon?	√	
5.	Objek pajak dari PBB adalah bumi dan bangunan. Uraikan kriteria objek pajak	√	

	yang tidak dikenakan PBB!		
6.	Jelaskan tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)!	√	
7.	Wajib pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana mereka mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Simpulkan kewajiban seorang wajib pajak!	√	
8.	Rumuskanlah tentang sengketa pajak dan hal-hal apa sajakah yang disengketakan?	√	
9.	Sebutkan objek pajak dari PPN dan PPnBM menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah!	√	
10.	Selain barang, jasa juga dikenai pajak. Sama dengan barang, semua jasa sebenarnya adalah Jasa Kena Pajak (JKP), akan tetapi terdapat beberapa jasa yang tidak tergolong dalam JKP. Rumuskan jasa yang tidak tergolong dalam JKP!	√	

B. Instrumen Keterampilan Berpikir Kreatif

Tabel 3. Uji Ahli Instrumen 1

No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	Relevan	Tidak Relevan
1.	Penyusunan proyek	Kelancaran	Peserta didik mampu menyusun proyek terkait dengan pemaparan APBD dan APBN secara sistematis tanpa hambatan.	√	
		Keaslian	Peserta didik menyusun proyek terkait dengan pemaparan APBD dan APBN yang	√	

			tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi cara menyusun, bahasa, maupun isi.		
		Keluwesan	Peserta didik menyusun proyek terkait dengan APBD dan APBN secara luwes ditinjau dari kerangka susunan proje, bahasa, maupun isi.	√	
		Pengembangan	Peserta didik menyusun proyek dengan cara mengelaborasi informasi awal yang mereka kumpulkan terkait dengan APBD dan APBN ditinjau dari isi kerangka yang disusun.	√	
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
2.	Perencanaan	Kelancaran	Perencanaan peserta didik terkait dengan APBN dan APBD dikerjakan dengan lancar tanpa hambatan.	√	
		Keaslian	Perencanaan yang dibuat oleh peserta didik terkait dengan APBN dan APBD tidak pernah dilakukan oleh orang lain ditinjau dari segi isi maupun bahasa.	√	
		Keluwesan	Perencanaan yang dilakukan secara luwes oleh peserta didik dimana isi dan bahasa yang digunakan mudah dipahami.	√	
		Pengembangan	Perencanaan yang dibuat peserta didik dielaborasi dengan informasi yang telah digali terkait dengan materi APBN dan APBD.	√	
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
3.	Penyajian	Kelancaran	Data perhitungan APBN dan APBD	√	

			disajikan dengan lancar tanpa ada hambatan.		
		Keaslian	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan dengan cara penyajian yang relevan dan berbeda dengan yang orang lain lakukan ditinjau dari isi dan bahasa.	√	
		Keluwesan	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan secara luwes oleh peserta didik dari segi isi maupun bahasa sehingga mudah dipahami.	√	
		Pengembangan	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan berdasarkan informasi yang telah dielaborasi oleh peserta didik sesuai dengan kaidah perhitungan dan sistem perpajakan yang berlaku.	√	
	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
	Presentasi	Kelancaran	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan lancar dan menguasai proyek dengan baik tanpa ada hambatan.	√	
		Keaslian	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan cara yang tidak dilakukan dari orang lain ditinjau dari segi isi dan bahasa.	√	
		Keluwesan	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD secara luwes sehingga mudah dipahami.	√	

		Pengembangan	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan mengelaborasi informasi dan sistematika perhitungan dengan baik.	√	
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
5.	Projek	Kelancaran	Secara keseluruhan proyek telah disusun, disajikan, dan disampaikan dengan lancar tanpa hambatan serta sudah sesuai dengan sistem perhitungan APBN dan APBD yang berlaku.	√	
		Keaslian	Secara keseluruhan proyek telah dilaksanakan dengan cara penyusunan, penyajian, maupun presentasi yang tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi isi maupun bahasa.	√	
		Keluwesannya	Secara keseluruhan proyek telah dilaksanakan dengan luwes sehingga tampilan, isi, dan bahasa bisa dipahami dengan baik.	√	
		Pengembangan	Elaborasi telah dilaksanakan sejak awal penyusunan proyek dan perhitungan data APBN dan APBD telah dielaborasi secara sistematis berdasarkan aturan yang berlaku.	√	

Tabel 4 Uji Ahli Instrumen 2

No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	Relevan	Tidak Relevan
1.	Penyusunan proyek	Kelancaran	Peserta didik mampu menyusun proyek terkait dengan pemaparan APBD dan APBN secara sistematis tanpa hambatan.	√	
		Keaslian	Peserta didik menyusun proyek terkait dengan pemaparan APBD dan APBN yang tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi cara menyusun, bahasa, maupun isi.	√	
		Keluwesannya	Peserta didik menyusun proyek terkait dengan APBD dan APBN secara luwes ditinjau dari kerangka susunan proje, bahasa, maupun isi.	√	
		Pengembangan	Peserta didik menyusun proyek dengan cara mengelaborasi informasi awal yang mereka kumpulkan terkait dengan APBD dan APBN ditinjau dari isi kerangka yang disusun.	√	
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
2.	Perencanaan	Kelancaran	Perencanaan peserta didik terkait dengan APBN dan APBD dikerjakan dengan lancar tanpa hambatan.	√	
		Keaslian	Perencanaan yang dibuat oleh peserta didik terkait dengan APBN dan APBD tidak pernah dilakukan oleh orang lain ditinjau dari segi isi maupun bahasa.	√	
		Keluwesannya	Perencanaan yang dilakukan secara luwes oleh peserta didik dimana isi dan	√	

			bahasa yang digunakan mudah dipahami.		
		Pengembangan	Perencanaan yang dibuat peserta didik dielaborasi dengan informasi yang telah digali terkait dengan materi APBN dan APBD.	√	
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
3.	Penyajian	Kelancaran	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan dengan lancar tanpa ada hambatan.	√	
		Keaslian	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan dengan cara penyajian yang relevan dan berbeda dengan yang orang lain lakukan ditinjau dari isi dan bahasa.	√	
		Keluwesannya	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan secara luwes oleh peserta didik dari segi isi maupun bahasa sehingga mudah dipahami.	√	
		Pengembangan	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan berdasarkan informasi yang telah dielaborasi oleh peserta didik sesuai dengan kaidah perhitungan dan sistem perpajakan yang berlaku.	√	
	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
	Presentasi	Kelancaran	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan lancar dan menguasai proyek dengan baik tanpa ada hambatan.	√	
		Keaslian	Peserta didik mempresentasikan	√	

			projek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan cara yang tidak dilakukan dari orang lain ditinjau dari segi isi dan bahasa.		
		Keluwesan	Peserta didik mempresentasikan projek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD secara luwes sehingga mudah dipahami.	√	
		Pengembangan	Peserta didik mempresentasikan projek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan mengelaborasi informasi dan sistematika perhitungan dengan baik.	√	
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi		
5.	Projek	Kelancaran	Secara keseluruhan projek telah disusun, disajikan, dan disampaikan dengan lancar tanpa hambatan serta sudah sesuai dengan sistem perhitungan APBN dan APBD yang berlaku.	√	
		Keaslian	Secara keseluruhan projek telah dilaksanakan dengan cara penyusunan, penyajian, maupun presentasi yang tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi isi maupun bahasa.	√	
		Keluwesan	Secara keseluruhan projek telah dilaksanakan dengan luwes sehingga tampilan, isi, dan bahasa bisa dipahami dengan baik.	√	
		Pengembangan	Elaborasi telah dilaksanakan sejak awal penyusunan projek dan perhitungan data APBN dan APBD	√	

			telah dielaborasi secara sistematis berdasarkan aturan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--



Lampiran 2. Daftar Nilai Hasil Uji Coba Instrumen Keterampilan Berpikir Kritis

Peserta didik	Butir Soal									
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
1	3	4	4	4	3	2	4	2	4	4
2	4	3	3	4	4	2	4	2	4	4
3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4
4	2	2	4	2	4	2	4	2	4	4
5	4	1	4	2	4	1	4	2	4	4
6	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3
7	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4
8	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
9	2	4	3	1	4	4	3	1	4	3
10	1	3	2	4	3	3	2	4	3	2
11	4	4	2	1	4	4	2	1	4	2
12	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
13	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
14	4	3	4	2	4	3	4	2	4	4
15	3	4	1	1	3	4	1	1	3	1
16	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4
17	4	1	1	3	4	1	1	3	4	1
18	3	4	3	3	4	2	4	2	4	4
19	4	3	3	4	3	1	4	2	4	4
20	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4
21	3	4	3	4	2	3	4	4	3	3
22	1	3	4	4	1	3	4	4	4	3
23	2	4	4	3	4	4	3	1	4	4
24	2	4	3	4	3	3	2	4	3	2

25	3	3	4	2	3	4	2	1	4	1
26	3	4	2	4	4	4	3	3	3	4
27	4	2	3	2	2	4	4	4	3	3
28	3	3	1	1	1	3	4	2	4	3
29	4	1	2	4	4	4	1	1	3	4
30	4	2	2	3	3	2	4	4	4	3
31	4	2	3	3	3	1	1	3	4	3
32	3	3	3	2	4	3	2	4	2	4
33	4	3	4	3	3	3	4	2	2	4
34	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3
35	3	3	3	3	4	2	3	2	4	3
36	2	4	2	4	3	3	1	1	3	4
37	2	4	2	4	4	1	2	4	4	3
38	3	4	3	4	4	2	2	3	4	4
39	4	3	4	3	4	2	3	3	4	4
40	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4
41	1	4	1	4	4	3	4	3	4	3
42	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
43	1	4	1	4	3	3	3	3	3	1

	Sig. (2-tailed)	.641	.430	.901	.616	.641	.568	.388		.411	.000	.010
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Butir Soal 9	Pearson Correlation	.213	-.064	.175	.012	.213	-.089	.319*	.124	1	-.010	.443**
	Sig. (2-tailed)	.155	.672	.244	.938	.155	.557	.031	.411		.945	.002
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Butir Soal 10	Pearson Correlation	-.118	-.143	-.166	-.088	-.118	-.178	-.103	.494**	-.010	1	.076
	Sig. (2-tailed)	.434	.342	.271	.561	.434	.237	.496	.000	.945		.615
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Total Score	Pearson Correlation	.699**	.347*	.645**	.328*	.699**	.320*	.287	.377**	.443**	.076	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.018	.000	.026	.000	.030	.053	.010	.002	.615	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	46	88.5
	Excluded ^a	6	11.5
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Based on Standardized Items	N of Items
.532	.497	10

Statistics

		Butir Soal 1	Butir Soal 2	Butir Soal 3	Butir Soal 4	Butir Soal 5	Butir Soal 6	Butir Soal 7	Butir Soal 8	Butir Soal 9
N	Valid	46	46	46	46	46	46	46	46	46
	Missing	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mean		3.22	3.26	3.17	3.17	3.22	3.24	3.46	3.17	3.17

Lampiran 4. Hasil Uji Pengguna User Judgement

No.	Indikator Berpikir Kreatif	Indikator Penilaian	Score				
			1	2	3	4	5
5.	Kelancaran	Peserta didik lancar dalam memaparkan konsep APBN dan APBD dalam sistem perpajakan dengan lancar baik segi isi maupun bahasa.				√	
6.	Keaslian	Peserta didik memaparkan konsep APBN dan APBD dalam sistem perpajakan yang tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi isi maupun bahasa.					√
7.	Keluwesan	Peserta didik luwes dalam menyajikan pemahaman terkait dengan konsep APBN dan APBD dalam sistem perpajakan baik dari segi isi maupun bahasa.				√	
8.	Pengembangan	Peserta didik memodifikasi ide baik dari segi isi dan bahasa dalam memaparkan konsep APBN dan APBD dalam sistem perpajakan.				√	
Total Score						17	
Mean Score						4.25	

Lampiran 5. Modul Pembelajaran Problem Based Learning Konvensional

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Sekolah	: SMA Negeri 1 Marga
Mata Pelajaran	: Ekonomi
Kelas / Semester	: XI / Dua
Materi Pokok	: APBN dan APBD
Alokasi Waktu	: 8 x 45 menit (4 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.

KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan **metakognitif** berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.6. Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	Pertemuan ke 1
	3.6.1 Menjelaskan pengertian APBN
	3.6.2 Mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBN
	3.6.3 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara
	3.6.4 Mengidentifikasi belanja Negara atau pengeluaran Negara
	3.6.5 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN
	3.6.6 Menjelaskan pengaruh APBN dalam perekonomian
	3.6.7 Menjelaskan kebijakan anggaran
	3.6.8 Mengidentifikasi macam-macam kebijakan anggaran
Pertemuan ke 2	
3.6.9 Menjelaskan pengertian APBD	

	3.6.10 Mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBD 3.6.11 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan Daerah 3.6.12 Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran Daerah Pertemuan ke 3 3.6.13 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 3.6.14 Menjelaskan pengaruh APBD dalam perekonomian 3.6.15 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	4.6.1. Mempresentasikan hasil evaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning*, peserta didik dapat menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, dan Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama.

D. Materi Pembelajaran

APBN

- Pengertian APBN
- Fungsi dan tujuan APBN
- Sumber-sumber penerimaan negara
- Jenis-jenis belanja negara
- Mekanisme penyusunan APBN
- Pengaruh APBN terhadap perekonomian

APBD

- Pengertian APBD
- Fungsi dan tujuan APBD
- Sumber-sumber penerimaan daerah
- Jenis-jenis belanja daerah
- Mekanisme penyusunan APBD
- Pengaruh APBD terhadap perekonomian

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan : *Saintifik*
- b. Model : *PBL*
- c. Metode : Ceramah, Diskusi, tanya jawab dan penugasan

F. Media Pembelajaran

Media/Alat : Laptop, LCD, Peta Konsep dan Power point

G. Sumber Belajar

- Buku Ekonomi untuk Kelas XI SMA Kurikulum 2013 (Tim MGMP Provinsi Bali)

- Ismawanto. 2017. Panduan Materi Sukses Olimpiade Sains Ekonomi Jilid 1 (Makro dan Mikro). Jakarta: Bina Prestasi Insani.
- Buku ekonomi lain yang relevan dan ber-isbn, internet dan nara sumber

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

a. Pertemuan Minggu I

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu Pendapatan suatu negara kemudian dihubungkan dengan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, dan V) dan diberikan waktu untuk diskusi 60 menit.	15 menit
Inti	a) Sebelum peserta didik mempelajari tentang APBN, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang perbedaan antara pendapatan nasional dengan penerimaan negara yang mereka ketahui. b) Kelompok I, dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang pengertian APBN dan asas penyusunannya melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. c) Kelompok III, dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Fungsi dan tujuan APBN dalam perekonomian melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. d) Kelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Sumber-sumber penerimaan Negara dan jenis belanja negara dalam perekonomian melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. e) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan data atau gambar-gambar yang relevan. f) Kelompok I, III dan V ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok II, IV, dan VI yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan. g) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja. h) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.	150 menit
Penutup	a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut. b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja. c) Guru menutup pembelajaran minggu ke-10 ini dengan memberikan ringkasan tentang makna APBN, Fungsi dan tujuan APBN, dan Sumber penerimaan Negara dan belanja negara. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok	15 menit

b. Pertemuan Minggu II

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).</p> <p>b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu Pengertian APBN, Fungsi dan Tujuan APBN serta sumber penerimaan Negara dan belanja negara dalam perekonomian kemudian menghubungkannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan kondisi kehidupan sehari-hari.</p> <p>c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.</p> <p>d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V, dan VI) dan diberikan waktu untuk diskusi 60 menit.</p>	15 menit
Inti	<p>a) Sebelum peserta didik mempelajari tentang sumber penerimaan Negara dan belanja negara, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang perbedaan antara pendapatan nasional dengan penerimaan negara yang mereka ketahui.</p> <p>b) Kelompok I dan II dan ditugaskan untuk melakukan kajian tentang mekanisme penyusunan APBN melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>c) Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Pengaruh APBN dalam perekonomian secara rinci melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>d) Kelompok, V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Kebijakan anggaran secara rinci melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>e) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan data atau gambar-gambar yang relevan.</p> <p>f) Kelompok II, IV dan VI ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok I, III, dan V yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan.</p> <p>g) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja.</p> <p>g) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.</p>	150 menit
Penutup	<p>a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawaban uji pemahaman materi</p> <p>c) Guru menutup pembelajaran minggu ke-11 ini dengan memberikan ringkasan tentang mekanisme penyusunan APBN dan Pengaruhnya terhadap perekonomian. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.</p> <p>d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok</p>	15 menit

c. Pertemuan Minggu III

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya. c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V, dan VI) dan diberikan waktu untuk diskusi 60 menit.	15 menit
Inti	a) Sebelum peserta didik mempelajari tentang Kebijakan Anggaran dan pengertian APBD serta fungsi dan tujuan APBD, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang penerimaan daerah dan belanja daerah yang mereka ketahui. b) Kelompok I, II dan III ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. c) Kelompok IV, V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Sumber penerimaan daerah dan jenis belanja daerah secara rinci melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. d) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan data atau gambar-gambar yang relevan. e) Kelompok II, IV, dan VI ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok I, III, dan V yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan. e) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja. f) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.	150 menit
Penutup	a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut. b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja. c) Guru menutup pembelajaran minggu ke-12 ini dengan memberikan ringkasan tentang Kebijakan anggaran dan APBD. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok	15 menit

d. Pertemuan Minggu IV

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).</p> <p>b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu Kebijakan anggaran dan APBD dan menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah daerah.</p> <p>c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.</p> <p>d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V, dan VI) dan diberikan waktu untuk diskusi 60 menit.</p>	15 menit
Inti	<p>a) Sebelum peserta didik mempelajari sumber penerimaan dan belanja daerah, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang kebijakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.</p> <p>b) Kelompok I, II dan III ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya dalam perekonomian melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>c) Kelompok IV, V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang mendeskripsikan APBN dan APBD melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>d) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan gambar-gambar yang relevan dan data-data kuantitatif.</p> <p>e) Kelompok II, III dan V ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok I, IV dan VI yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan.</p> <p>f) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja.</p> <p>g) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.</p>	150 menit
Penutup	<p>a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut.</p> <p>b) Peserta didik diberikan pertanyaan lisan secara acak untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran minggu ini.</p> <p>c) Sebelum mengakhiri pelajaran, peserta didik diminta untuk menyerahkan kertas kerja dan melakukan penilaian</p> <p>d) Guru menutup pembelajaran minggu ke-13 ini dengan memberikan ringkasan tentang sumber penerimaan daerah dan belanja daerah, serta Mekanisme APBD. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.</p> <p>e) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok</p>	15 menit

I. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

1. Teknik Penilaian :
 - A. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis
 - B. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik dan Portofolio
2. Bentuk Penilaian :
 - A. Tes tertulis : Pilihan ganda dan Uraian beserta pedoman penilaian
 - B. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi dan pedoman penilaian
 - C. Portofolio : Pengumpulan tugas mandiri
3. Instrumen penilaian : terlampir
4. Alat Penilaian : Soal terlampir

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1Marga

Marga, 15 Juli 2022
Guru Mata Pelajaran
Ekonomi

I Wayan Kantun Arimbawa,S.Ag.,M.Pd.H
NIP.196210091983011008

Siluh Made Surya Kartini,SE
NIP. 197704212010012014



Lampiran Materi Pembelajaran

Materi Pertemuan I

APBN DAN APBD

A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. Pengertian APBN

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), setiap tahun Presiden mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, selanjutnya disebut **APBN**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun.

Penyusunan APBN didasarkan asas berimbang dan dinamis, artinya di sektor penerimaan negara selalu diusahakan peningkatan dan di sektor pengeluarannya diusahakan penghematan rutin serta lebih mengarahkan dana pembangunan kepada kegiatan yang menunjang peningkatan produksi nasional, yang mana besarnya pengeluaran (belanja) seimbang dengan penerimaannya.

Secara rinci penyusunan APBN didasarkan :

- a. Asas berimbang dan dinamis penerimaan-pengeluaran
- b. Tabungan/Saving selalu meningkat
- c. Peningkatan pendapatan pajak, secara : intensif dan ekstensif
- d. Prioritas pengeluaran rutin yang penting
- e. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia secara maksimal.

2. Fungsi dan tujuan APBN

Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dijelaskan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Atau dengan kata lain Fungsi alokasi, yaitu APBN dapat menunjukkan sasaran dan prioritas pembangunan dan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan **Public Goods** atau Kebutuhan umum akan terpenuhi
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Atau dengan kata lain Fungsi distribusi, yaitu APBN dapat menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Atau

dengan kata lain Fungsi stabilisasi, yaitu APBN diharapkan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang dan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendali inflasi

3. Sumber-sumber Penerimaan Negara dan Jenis-Jenis Pengeluaran Negara

Berdasarkan pasal 11 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBN, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Sumber-sumber Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara (Postur RAPBN 2017)

SUMBER PENERIMAAN NEGARA
<p>A. PENDAPATAN NEGARA</p> <p>I. PENERIMAAN DALAM NEGERI</p> <p>1. Penerimaan Perpajakan</p> <p>a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Pajak Penghasilan <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan PPh Migas b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan) 5) Pendapatan Cukai 6) Pendapatan Pajak Lainnya <p>b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Bea masuk 2) Pendapatan Bea keluar <p>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>a. Pendapatan Sumber Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan Sumber Daya Alam Migas <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan Minyak Bumi b) Pendapatan Gas Bumi 2) Penerimaan Sumber Daya Alam Non migas <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan Pertambangan Minerba (Mineral dan Batu Bara) b) Pendapatan Kehutanan c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi <p>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbankan 2) Non Perbankan <p>c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya</p> <p>d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)</p>

II. PENERIMAAN HIBAH
JENIS BELANJA NEGARA ATAU PENGELUARAN NEGARA
B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga <ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran bunga Utang Negara <ul style="list-style-type: none"> 1) Utang Dalam Negeri 2) Utang Luar Negeri b. Pengelolaan Subsidi <ul style="list-style-type: none"> 1) Subsidi Energi 2) Subsidi Non Energi c. Belanja Hibah II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Perimbangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Dana Transfer Umum <ul style="list-style-type: none"> a) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam b) Dana Alokasi Umum 2) Dana Transfer Khusus <ul style="list-style-type: none"> a) Dana Alokasi Khusus Fisik b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik b. Dana Insentif Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3) Dana Bantuan Operasional Sekolah 4) Dana Insentif Daerah 5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY <ul style="list-style-type: none"> 1) Dana Otonomi Khusus <ul style="list-style-type: none"> a) Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat b) Dana Otsus Provinsi Aceh c) Dana tambahan Otsus Infrastruktur (Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat) 2) Dana Keistimewaan DIY 2. Dana Desa
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS (DIFISIT) ANGGARAN (A – B) % Surplus (Defisit) Anggaran terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN UTANG 1. Surat Berharga Negara (Neto) 2. Pinjaman (Neto) Dalam Negeri dan Luar Negeri II. PEMBIAYAAN INVESTASI 1. Investasi Kepada BUMN 2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya 3. Investasi Kepada BLU (Badan Layanan Umum) 4. Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional 5. Penerimaan Kembali Investasi 6. Cadangan Pembiayaan Investasi III. PEMBERIAN PINJAMAN 1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya 2. Cadangan Pemberian Pinjaman IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN

1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN

V. PEMBIAYAAN LAINNYA

1. Saldo Anggaran Lebih
2. Hasil Pengelolaan Aset

Sumber : Kementerian Keuangan 2016

Sedangkan tabungan Negara atau pemerintah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Tabungan Pemerintah} = \text{Penerimaan Dalam Negeri} - \text{Pengeluaran Rutin}$$

Semakin tinggi tabungan pemerintah atau Negara maka akan dapat meningkatkan investasi atau penanaman modal untuk usaha sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar atau dengan kata lain APBN menunjukkan **surplus**. Dan *Keseimbangan primer* adalah total penerimaan atau pendapatan Negara dikurangi belanja dalam APBN tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Jika berada dalam kondisi defisit, penerimaan negara tidak bisa menutup pengeluaran sehingga membayar bunga utang sudah menggunakan pokok utang baru.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN I

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Jelaskan pengertian APBN dan UU yang mengatur penyusunan APBN!
2. Identifikasikan fungsi APBN!
3. Bagaimana tujuan penyusunan APBN?
4. Identifikasikan secara rinci sumber-sumber penerimaan Negara dalam APBN!
5. Identifikasikan secara rinci jenis-jenis pembelanjaan Negara!

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

Lakukanlah diskusi tentang permasalahan berikut dengan rekan kelompokmu!

1. Carilah informasi mengenai APBN pada tahun terakhir dan penjelasannya
2. Informasi bisa diperoleh melalui media massa maupun internet.
3. Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi.

Materi Pertemuan 2

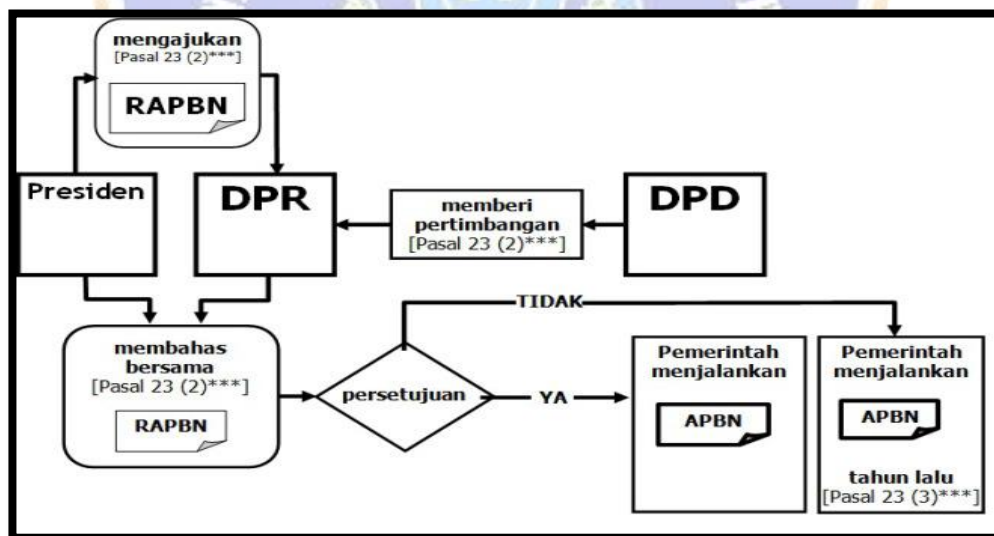
A. MEKANISME PENYUSUNAN APBN DA PENGARUHNYA DALAM PEMBANGUNAN

1. Mekanisme penyusunan APBN

Berdasarkan pasal 15 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBN, dijelaskan proses penyusunan APBN sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
- (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Proses penyusunan APBN secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



2. Pengaruh APBN terhadap perekonomian

1. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun.
2. Dapat menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, sebabnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.
3. Dapat menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri.
4. Dapat memperlancar Distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta yang lainnya.

5. Dapat memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Pada gilirannya akan terbentuk tabungan masyarakat sehingga meningkatkan investasi yang menyebabkan semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Penyusunan APBN dapat juga mempengaruhi inflasi/deflasi yang akan terjadi dimasyarakat

3. Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur APBN agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Tujuan kebijakan anggaran adalah menentukan arah dan tujuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari rencana kerja tahunan pemerintah.

Sedangkan macam-macam Kebijakan Anggaran

- a. Anggaran Seimbang (balance budget)
Semua pengeluaran didasarkan pada penerimaan. Pada akhirnya, jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan. Tujuan penyusunan anggaran seimbang adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran defisit
- b. Anggaran Dinamis
Dalam anggaran dinamis berarti bahwa jumlah mutlak dari anggaran dari tahun ke tahun semakin besar.
- c. Anggaran Defisit
Penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. Kebijakan ini dijalankan karena pemerintah akan memperbaiki keadaan perekonomian negara yang sedang menurun atau dilanda deflasi. Dalam hal ini pemerintah menutup kekurangan anggaran dengan pinjaman dalam dan luar negeri
- d. Anggaran Surplus
Penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi untuk menyesuaikan anggaran dengan kenaikan harga barang/jasa. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan penerimaan negara (pajak dan nonpajak) dan penghematan.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 2

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Bagaimana mekanisme penyusunan APBN? Jelaskan!
2. Gambarkan secara bagan mekanisme penyusunan APBN!
3. Apabila rancangan penyusunan APBN tidak disetujui oleh DPR, apa yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Identifikasikan pengaruh penyusunan APBN terhadap perekonomian suatu Negara!
5. Apakah APBN dapat mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi? Jelaskan!

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

Tugas :**TUGAS DISKUSI KELOMPOK**

Carilah data melalui internet tentang sumber penerimaan Negara yang tercantum dalam APBN selama 5 tahun terakhir dan APBN salah satu Negara maju, kemudian diskusikan penjabarannya! Dan Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!



Materi Pertemuan 3

C. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Pengertian APBD

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disebut **APBD**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan yang disetujui oleh DPRD.

2. Fungsi dan Tujuan APBD

Fungsi dan tujuan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya perbedaannya ruang lingkup APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dalam APBD akan tercermin pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

3. Sumber-sumber penerimaan daerah dan Jenis-jenis pengeluaran daerah

Berdasarkan pasal 16 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBD, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Sumber-sumber Penerimaan Daerah.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah d. Penerimaan dari Dinas-dinas daerah e. Penerimaan lain-lain 3. Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak a. Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana perimbangan d. Pinjaman pemerintah daerah e. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) f. Lain-lain pendapatan yang sah
Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran belanja rutin <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja DPRD

- b. Belanja Kepala Daerah
 - c. Belanja Pegawai
 - d. Belanja Barang
 - e. Belanja Pemeliharaan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas
 - g. Belanja lain-lain
 - h. Angsuran pinjaman dan bunga
 - i. Subsidi kepada daerah bawahan
 - j. Pengeluaran yg tidak termasuk bagian lain
 - k. Pengeluaran tak terduga
2. Anggaran Belanja Pembangunan
- a. Proyek-proyek daerah
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah
 - c. Proyek-proyek pembangunan

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 3

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Terangkan apa yang dimaksud dengan kebijakan Fiskal dan Kebijakan Anggaran !
2. Identifikasikan kebijakan anggaran!
3. Jelaskan pengertian APBD dan peraturan yang mengatur penyusunan APBD!
4. Jelaskan fungsi dan tujuan penyusunan APBD!
5. Dalam APBD terdapat sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Jelaskan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dar pusat!

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS MANDIRI

1. Carilah data melalui internet tentang peraturan yang mengatur tentang penyusunan APBD!
2. Carilah data melalui internet tentang kebijakan anggaran yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia!
3. Tullislah di buku tugasmu untuk dilaporkan kepada Gurumu!

Materi Pertemuan IV

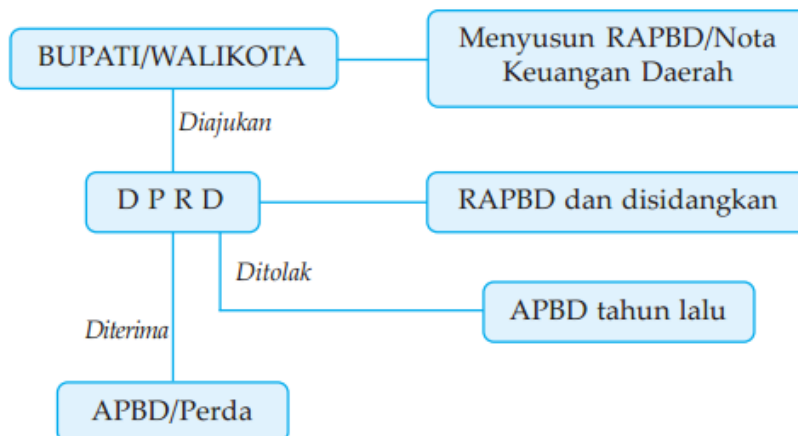
D. MEKANISME PENYUSUNAN APBD DAN PENGARUHNYA DALAM PEMBANGUNAN

1. Mekanisme penyusunan APBD

Berdasarkan pasal 20 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBD, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Proses penyusunan APBD secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



2. Pengaruh APBD terhadap perekonomian

Pengaruh APBD terhadap perekonomian sama dengan pengaruh APBN terhadap perekonomian, hanya perbedaannya ruang lingkup APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 4

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Jelaskan Perbedaan antara APBN dan APBD !
2. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Identifikasikan sumber Pendapatan asli daerah !
3. Jelaskan jenis-jenis belanja pemerintah daerah!
4. Bagaimana mekanisme penyusunan APBD dan gambarkan proses penyusunan APBD?
5. Bagaimana pengaruh penyusunan APBD dalam perekonomian?

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI PESERTA DIDIK

1. Carilah data melalui internet tentang APBD salah satu provinsi dan Indonesia dan APBD salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia!
2. Berikan penjelasan seperlunya data APBD tersebut!
3. Diskusikan dengan kelompokmu
4. Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!



PENILAIAN LAPORAN**Penilaian kompetensi ketrampilan : Penilaian Proyek**

KD	IPK
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	4.6.1. Mempresentasikan hasil evaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan

Satuan pendidikan : SMA NEGERI MARGA
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Kelas/Semester : XI/2
 Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik/Kelompok	Skor Perolehan					Jml
		Kerjasama kelompok	Kecepatan pengerjaan	Ketepatan pengerjaan	Tehnik presentasi	Laporan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai akhir ketrampilan :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{5}$$

Penilaian kompetensi ketrampilan : Portofolio

KD	IPK
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	4.6.1. Mempresentasikan hasil evaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan

Satuan pendidikan : SMA NEGERI 1 MARGA

Tahun pelajaran : 2022/2023

Kelas/Semester : XI/2

Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik	SKOR			Nilai Akhir
		Ketepatan waktu	Kerapihan	Kebenaran Jawaban	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Perolehan Score}}{3}$$



SOAL ULANGAN HARIAN

1. Pada APBN tahun 2014/2015 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:
- 1) Hibah
 - 2) Pembayaran cicilan Utang
 - 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 4) Pajak perdagangan internasional
 - 5) Subsidi BBM
 - 6) Bagian pemerintah atas laba BUMN
 - 7) Migas
 - 8) Pembiayaan Pembangunan
- Dari uraian sumber pendapatan dan belanja negara tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah
- A. 1), 2), 3), dan 4)
 - B. 2), 3), 5), dan 7)
 - C. **3), 4), 6), dan 7)**
 - D. 4), 5), 7), dan 8)
 - E. 5), 6), 7), dan 8)

2. Ringkasan APBN 2013 – 2015 (dalam Miliar Rupiah) :

No.	Keterangan	2013	2014	2015
B.	Belanja Negara	1.294.999,2	1.548.310,4	1.681.011,1
I.	Belanja Pemerintah Pusat	883.722,0	1.069.534,4	1.154.380,9
II.	Transfer ke Daerah	411.324,8	478.775,9	528.630,2
	1. Dana perimbangan	347.246,2	408.352,1	444.798,8
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64.078,6	70.423,9	83.831,5

Berdasarkan data tersebut maka dampak APBN untuk masyarakat adalah

- A. **belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga belum mencerminkan upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat**
 - B. belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya percepatan kesejahteraan masyarakat
 - C. belanja negara yang menitikberatkan belanja pemerintah akan mempercepat pengentasan kemiskinan di masyarakat
 - D. belanja negara dititikberatkan pada dana transfer ke daerah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi
 - E. belanja negara yang menitikberatkan pada transfer dana otonomi daerah akan mempercepat peningkatan pendapatan nasional
3. Berikut ini sebagian APBD salah satu provinsi di Indonesia (dalam triliun rupiah) :

A	Pendapatan	
	- PAD	Rp 7.585
	- Dana perimbangan	Rp 5.770
B	- Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 109
	Belanja	
	1. Aparatur	
	- Belanja administrasi umum	Rp 2.414
	- Belanja operasi dan pemeliharaan	Rp 1.286

- Modal	Rp 648
2. Publik	
- Belanja administrasi umum	Rp 2.218
- Belanja operasi dan pemeliharaan	Rp 2.692
- Modal	Rp 2.757

Berdasarkan data di atas dampak terhadap kegiatan ekonomi adalah

- APBD tersebut defisit sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang
- APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah bertambah
- APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang
- pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur dana karena APBD defisit
- terjadi keseimbangan APBD, sehingga pelayanan pemerintah daerah tersebut stabil

4. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- Menjual surat-surat berharga
- Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri tahun depan
- Pemerintah menghapus adanya subsidi BBM
- Belanja layanan publik di setiap instansi
- Pembangunan untuk sektor lembaga

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah

- (1), (2), dan (3)
- (1), (3), dan (4)
- (2), (3), dan (4)
- (2), (4), dan (5)
- (3), (4), dan (5)

5. Awal tahun 2014 Indonesia mendapat bantuan berupa utang luar negeri dengan syarat lunak dari CGI sebesar 3,4 Miliar Dolar AS. Utang luar negeri tersebut pada dasarnya dapat menguntungkan dan merugikan bangsa Indonesia, antara lain:

- Mengangkat martabat bangsa Indonesia dengan meningkatnya pertumbuhan
- Indonesia dapat menjadi negara yang ketergantungan dari utang luar negeri
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Mendorong laju pertumbuhan di daerah
- Pembayaran cicilan utang luar negeri memberatkan APBN

Keburukan dari mendapat bantuan berupa utang luar negeri adalah

- 1 dan 2
- 2 dan 3
- 2 dan 5
- 3 dan 4
- 4 dan 5

6. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari:

- pajak penghasilan
- pajak kendaraan bermotor
- pajak pertambahan nilai
- pajak tontonan
- pajak impor
- pajak bumi dan bangunan desa dan kota

Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah daerah adalah

- 1, 2, dan 3
- 1, 3, dan 5

- c. 2, 4, dan 6
- d. 3, 4 dan 5
- e. 4, 5 dan 6

7. Beberapa pernyataan fungsi dan tujuan APBN sebagai berikut :
- (1) Mengalokasikan dana yang dimiliki pemerintah untuk belanja setiap departemen.
 - (2) Sebagai dasar untuk menetapkan proyek pemerintah yang harus dibiayai sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - (3) Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
 - (4) Sebagai pedoman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - (5) Membagikan dana, tidak hanya untuk kepentingan umum, melainkan untuk subsidi dan dana pensiun.
- Dari pernyataan di atas, yang termasuk fungsi APBN adalah ...
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
8. Berikut ini fungsi dan tujuan APBN:
- (1) Pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara
 - (2) Pedoman untuk merencanakan kegiatan yang mendukung pembelanjaan
 - (3) Pedoman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja
 - (4) Pedoman untuk kegiatan penyelenggaraan negara
 - (5) Pedoman untuk menetapkan kebijakan ekonomi
- Yang merupakan fungsi APBN adalah
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)**
 - C. (1), (4), dan (5)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
9. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I (Propinsi) proses penyusunannya adalah
- a. Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh DPR RI
 - b. Disusun oleh pemerintah daerah tingkat I, lalu mendapat persetujuan presiden untuk disahkan oleh DPR RI
 - c. Disusun bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD tingkat I lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR RI
 - d. Disusun oleh pemerintah daerah tingkat I dan disahkan oleh DPRD tingkat I setempat**
 - e. Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh presiden
10. Anggaran pendapatan dan belanja Negara pemerintah pusat sebuah Negara diketahui berjumlah total \$ 900 miliar, penerimaan dari sumber-sumber dalam negerinya sebesar \$ 700 miliar, sedangkan belanja atau pengeluaran untuk keperluan rutin senilai \$ 600 miliar. Bertolak dari informasi ini, tabungan pemerintah Negara tersebut adalah sebesar
- a. \$ 100 miliar**
 - b. \$ 200 miliar
 - c. \$ 300 miliar
 - d. \$ 400 miliar
 - e. \$ 1.000 miliar

11. Tunjukkan ayat belanja barang yang mana di bawah ini yang TIDAK TERMASUK di dalam neraca APBN....
- belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Keuangan
 - belanja barang-barang kebutuhan Bank Sentral (Bank Indonesia)**
 - belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Pertahanan
 - belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Luar Negeri
 - belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Luar Negeri
12. Jenis pajak dalam APBN Indonesia adalah
- Biaya fiskal ke luar negeri
 - Cukai**
 - Denda / tilang
 - PPN-BM
 - Laba BUMN
13. Di Indonesia pajak yang sebagian hasil pemungutannya diserahkan/dkembalikan ke daerah (kabupaten, kota dan provinsi) ialah....
- Pajak penjualan
 - Pajak penghasilan
 - Cukai dan bea impor
 - Pajak pertambahan nilai
 - Pajak bumi dan bangunan**
14. Pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lain diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat umum. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi
- stabilisasi
 - alokasi**
 - efisiensi
 - distribusi
 - pemerataan
15. Berikut ini yang bukan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah...
- pajak penghasilan warga daerah tersebut**
 - pajak reklame / iklan
 - pajak kendaraan bermotor
 - retribusi parkir
 - laba BUMD
16. Berikut ini adalah sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- PAD
 - DAU
 - Retribusi
 - DAK
 - Dana Bagi Hasil
- Dari sumber penerimaan APBD di atas, yang termasuk Dana Perimbangan adalah butir....
- 1, 2, dan 3
 - 1, 2, dan 5
 - 2, 3, dan 4
 - 2, 4, dan 5**
 - 3, 4, dan 5
17. Jika pemerintah menaikkan anggaran dalam dana perimbangan (DAK, DAU dan dana alokasi khusus) maka pengaruhnya dalam APBD adalah
- anggaran pengeluaran pemerintah daerah meningkat
 - anggaran penerimaan pemerintah daerah meningkat**
 - anggaran pemerintah daerah tetap

- d. anggaran pengeluaran pemerintah daerah menurun
- e. anggaran penerimaan pemerintah daerah menurun

18. Komponen APBN dan APBD sebagai berikut:

- 1) Bea Pendapatan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2) Pos retribusi
- 3) Bagi hasil dan bantuan keuangan
- 4) Bagian laba BUMN
- 5) Subsidi BBM dan non BBM

Yang merupakan komponen APBN adalah butir....

- A. 1, 2, dan 3 D. 2, 3, dan 4
- B. 1, 3, dan 4 E. **2, 4, dan 5**
- C. 1, 4, dan 5

19. Ayat-ayat di bawah ini merupakan pengeluaran atau belanja rutin Pemerintah Pusat, KECUALI

- A. pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan militer
- B. **pembayaran gaji pegawai BUMN**
- C. belanja barang-barang kebutuhan pemerintah pusat
- D. pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri
- E. pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi non-BBM

20. Secara teknis, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam hal ini adalah....

- a. kementerian keuangan
- b. bank sentral(BI)
- c. badan perencanaan dan pembangunan nasional
- d. **presiden dan wakil presiden**
- e. kementerian keuangan, bappenas, dan bank sentral

21. Seorang gubernur yang baru terpilih dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah agar dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui pos dibawahini, KECUALI... .

- (A) Pajak kendaraan bermotor
- (B) bea balik nama kendaraan bermotor
- (C) pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (D) **pajak penerangan jalan**
- (E) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

22. Misalkan diketahui bahwa $AE = 7.000.000.000 + 0,75y$. Berdasarkan persamaan tersebut, titik keseimbangan pendapatan akan berada pada besaran:

- A. Rp. 8.000.000.000,00
- B. Rp. 10.000.000.000,00
- C. Rp. 20.000.000.000,00
- D. Rp. 25.000.000.000,00
- E. **Rp. 28.000.000.000,00**

Keterangan:

AB : Pengeluaran keseluruhan (aggregate expenditure)

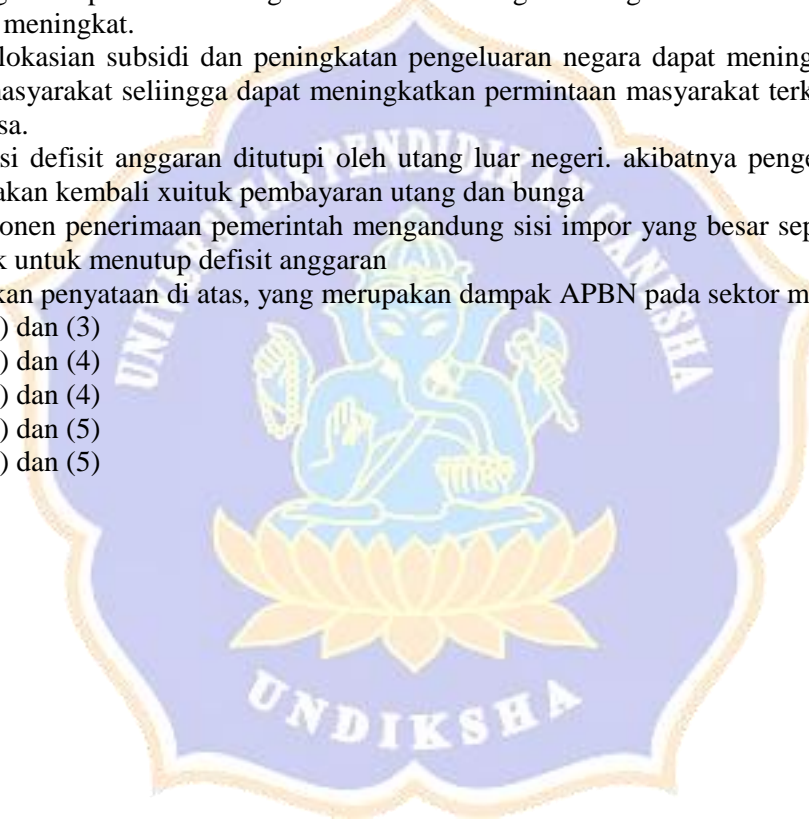
Y : PDB

23. Pemerintah Kota Solo akan membatasi agenda perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) dalam dan luar negeri mulai tahun depan. Hal ini dibahas sejak penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) APBD 2017.

Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang mungkin terjadi adalah

- A. Perjalanan dinas dan kunjungan kerja akan berangsur-angsur dikurangi
- B. **Pengeluaran daerah kota Solo akan semakin efisien dibandingkan sebelumnya**
- C. Pendapatan kota Solo dari sektor pariwisata daerah akan mengalami penurunan
- D. Perjalanan dinas dan kunjungan kerja pemerintah kota Solo akan dihapuskan

- E. Selisih pengurangan anggaran dapat dimanfaatkan untuk kenaikan gaji pegawai honor
24. Pemenuhan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 20% dari total APBN akan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi.
Dampak positif bagi masyarakat atas penggunaan dana APBN adalah
- meningkatkan daya beli/konsumsi masyarakat terhadap barang/jasa
 - mendorong peningkatan pariwisata dalam negeri dan luar negeri
 - meningkatnya arus urbanisasi penduduk desa ke kota dengan cepat
 - mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di kota dan desa
 - meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan**
25. Berikut ini dampak-dampak APBN terhadap sektor moneter, neraca pembayaran dan sektor produksi:
- Peningkatan jumlah pengeluaran negara dalam APBN dapat meningkatkan jumlah yang beredar
 - Peningkatan penerimaan negara dan sektor migas, mengakibatkan hasil penjualan migas meningkat.
 - Pengalokasian subsidi dan peningkatan pengeluaran negara dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
 - Kondisi defisit anggaran ditutupi oleh utang luar negeri, akibatnya pengeluaran rutin digunakan kembali untuk pembayaran utang dan bunga
 - Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar seperti bantuan proyek untuk menutup defisit anggaran
- Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan dampak APBN pada sektor moneter adalah
- (1), (2) dan (3)
 - (1), (2) dan (4)
 - (2), (3) dan (4)
 - (2), (4) dan (5)
 - (3), (4) dan (5)



**MODUL PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Sekolah	: SMA Negeri 1 Marga
Mata Pelajaran	: Ekonomi
Kelas / Semester	: XI / Dua
Materi Pokok	: Perpajakan
Alokasi Waktu	: 8 x 45 menit (4 kali pertemuan)

J. Kompetensi Inti

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.

KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan **metakognitif** berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

K. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.7. Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi	<p>Pertemuan ke 1</p> <p>3.7.1. Menjelaskan pengertian pajak</p> <p>3.7.2. Mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak</p> <p>3.7.3. Menjelaskan hubungan antara pajak dengan APBN</p> <p>3.7.4. Menjelaskan perbedaan antara Pajak dengan pungutan resmi lainnya</p> <p>3.7.5. Menjelaskan asas pemungutan pajak</p> <p>3.7.6. Menjelaskan pengelompokan pajak</p> <p>Pertemuan ke 2</p> <p>3.7.7. Menjelaskan cara pemungutan pajak di Indonesia</p> <p>3.7.8. Mengidentifikasi macam-macam tarif pajak</p> <p>3.7.9. Menjelaskan alur pemungutan pajak di Indonesia</p>

	3.7.10. Mengidentifikasi U perpajakan di Indonesia 3.7.11. Menjelaskan UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pertemuan ke 3 3.7.12. Mengidentifikasi objek PPh, PPN dan PBB 3.7.13. Menghitung PPh dan PBB Pertemuan ke 4 3.7.14. Menjelaskan tantangan pajak di Indonesia 3.7.15. Mensimulasikan fungsi dan manfaat pajak 3.7.16. Menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak
4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi	4.7.1. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak

L. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning*, peserta didik dapat menganalisis Perpajakan dalam pembangunan ekonomi, dan menyajikan hasil analisis fungsi dan peran Perpajakan dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama.

M. Materi Pembelajaran

Perpajakan

1. Pengertian pajak
2. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak
3. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
4. Asas pemungutan pajak
5. Jenis-jenis pajak
6. Sistem pemungutan pajak di Indonesia
7. Objek dan cara pengenaan pajak

N. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

- b. Pendekatan : *Saintifik*
- c. Model : *PBL*
- d. Metode : Ceramah, Diskusi, tanya jawab dan penugasan

O. Media Pembelajaran

P. Media/Alat : Laptop, LCD, Peta Konsep dan Power point

Q. Sumber Belajar

- Buku Ekonomi untuk Kelas XI SMA Kurikulum 2013 (Tim MGMP Provinsi Bali)
- Ismawanto. 2017. Panduan Materi Sukses Olimpiade Sains Ekonomi Jilid 1 (Makro dan Mikro). Jakarta: Bina Prestasi Insani.
- Buku ekonomi lain yang relevan dan ber-isbn, internet dan nara sumber

R. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses	10 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<p>belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).</p> <p>b) Peserta didik disinggung t materi minggu lalu yaitu APBN dan APBD kemudian dihubungkan dengan pendapatan Negara dan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.</p> <p>c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.</p> <p>d) Peserta didik dibagi menjadi lima kelompok (kelompok I, II, III, IV, V) dan diberikan waktu untuk diskusi 30 menit.</p>	
Inti	<p>a) Sebelum peserta didik mempelajari tentang APBN, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang perbedaan antara penerimaan Negara berupa pajak dan bukan pajak yang mereka ketahui.</p> <p>b) Kelompok I dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang pengertian Pajak, Fungsi dan manfaat pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>3.7.1. Menjelaskan pengertian pajak</p> <p>3.7.2. Mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak</p> <p>c) Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Hubungan antara pajak dengan APBN pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>3.7.3. Menjelaskan hubungan antara pajak dengan APBN</p> <p>d) Kelompok IV dan V ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak dan pengelompokan pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>3.7.4. Menjelaskan perbedaan antara Pajak dengan pungutan resmi lainnya</p> <p>3.7.5. Menjelaskan asas pemungutan pajak</p> <p>3.7.6. Menjelaskan pengelompokan pajak</p> <p>e) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan data atau gambar-gambar yang relevan.</p> <p>f) Setiap Kelompok (5 kelompok) ditunjuk oleh guru secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kajiannya kemudian kelompok yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan.</p> <p>g) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja.</p> <p>g) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.</p>	70 menit
Penutup	<p>a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja.</p> <p>c) Guru menutup pembelajaran minggu ke-14 ini dengan memberikan ringkasan tentang makna pajak, fungsi dan manfaat pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, dan asas pemungutan pajak . Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.</p> <p>d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok</p>	10 menit

Pertemuan II

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu Pengertian pajak, fungsi dan manfaatnya kemudian menghubungkannya dengan fasilitas yang sudah disediakan Negara dalam kehidupan sehari-hari. c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V) dan diberikan waktu untuk diskusi 30 menit.	10 menit
Inti	a) Sebelum peserta didik mempelajari tentang Jenis pajak, system pemungutan pajak dan alur administrasi perpajakan di Indonesia peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang bagaimana cara membayar pajak yang mereka ketahui. b) Kelompok I, dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Cara pemungutan pajak dan tarif pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 3.7.7. Menjelaskan cara pemungutan pajak di Indonesia 3.7.8. Mengidentifikasi macam-macam tarif pajak c) Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Alur perpajakan di Indonesia dan UU Perpajakan melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 3.7.9. Menjelaskan alur pemungutan pajak di Indonesia 3.7.10. Mengidentifikasi Undang-undang perpajakan di Indonesia d) Kelompok V ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU nomor 28 tahun 2007 tentang KUP melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 3.7.11. Menjelaskan UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan e) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan data atau gambar-gambar yang relevan. f) Kelompok II, IV, ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok I, III, dan V yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan. g) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja. g) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.	70 menit
Penutup	a) Peserta didik ditanya apakah sdh memahami materi tersebut. b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawaban uji pemahaman materi c) Guru menutup pembelajaran dengan memberikan ringkasan tentang Jenis pajak, system pemungutan pajak dan alur administrasi perpajakan di Indonesia. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok	10 menit

Pertemuan III

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu Jenis pajak, system pemungutan pajak dan alur administrasi perpajakan di Indonesia. c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, dan V) dan diberikan waktu untuk diskusi 30 menit.	10 menit
Inti	a) Sebelum peserta didik mempelajari tentang PPh, PPN dan PBB , peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang mengapa pemerintah memungut Pajak dari yang mereka ketahui. b) Kelompok I, II dan III ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU PPh melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 3.7.12. Mengidentifikasi objek PPh, PPN dan PBB c) Kelompok IV, dan V ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Perhitungan PPh dan PBB melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. d) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan data atau gambar-gambar yang relevan. 3.7.13. Menghitung PPh dan PBB e) Kelompok I, IV dan V ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok II, IV yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan. e) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja. f) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.	70 menit
Penutup	a) Peserta didik dapat apakah memahami materi tersebut. b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja. c) Guru menutup pembelajaran dengan memberikan ringkasan tentang KUP dan PPh. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. d) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok	10 menit

Pertemuan IV

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a) Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi (absensi, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). b) Peserta didik disinggung tentang materi minggu lalu yaitu KUP dan PPh. c) Peserta didik ditegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. d) Peserta didik dibagi menjadi enam kelompok (kelompok I, II, III, IV, V) dan diberikan waktu untuk diskusi 30 menit.	10 menit
Inti	a) Sebelum peserta didik mempelajari Tantangan pajak di Indonesia, peserta didik dapat diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang kebijakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota berkaitan dengan pajak. b) Kelompok I dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU, PPN, buku-buku yg tersediater masuk ke perpustakaan. 3.7.14. Menjelaskan tantangan pajak di Indonesia 3.7.15. Mensimulasikan fungsi dan manfaat pajak 3.7.16. Menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak c) Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU PBB melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. d) Kelompok V ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Perhitungan PBB dan tantangan pajak di Indonesia melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. e) Setiap kelompok harus membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Hasil kajian itu sebaiknya didukung dengan gambar-gambar yang relevan dan data-data kuantitatif. f) Kelompok II, III dan V ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan kajiannya kemudian kelompok I, IV yang tidak presentasi dapat mengajukan pertanyaan. g) Peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja. g) Hasil diskusi kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.	70 menit
Penutup	a) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi tersebut. b) Peserta didik diberikan pertanyaan lisan secara acak untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran minggu ini. c) Sebelum mengakhiri pelajaran, peserta didik diminta untuk menyerahkan kertas kerja dan melakukan penilaian d) Guru menutup pembelajaran minggu ke-17 ini dengan memberikan ringkasan tentang PPN, PBB, Bea Meterai, Tantangan pajak dan simulasi pajak. Dan mengajak berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.	

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	e) Peserta didik diberikan uji pemahaman materi dan tugas mandiri atau tugas kelompok	

Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

5. Teknik Penilaian :
 - C. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis
 - D. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik dan Portofolio
6. Bentuk Penilaian :
 - A. Tes tertulis : Pilihan ganda dan Uraian beserta pedoman penilaian
 - B. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi dan pedoman penilaian
 - C. Portofolio : Pengumpulan tugas mandiri
7. Instrumen penilaian : terlampir
8. Alat Penilaian : Soal terlampir

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Marga

I Wayan Kantun Arimbawa, S.Ag.M.Pd.H
NIP. 196210091983011008

Marga, 15 Juli 2022
Guru Mata Pelajaran
Ekonomi

Siluh Made Surya Kartini, SE
NIP. 197704212010012014



**Lampiran Materi Pembelajaran
Materi Pertemuan I**

PERPAJAKAN

1. Pengertian pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak :

- a. Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara
- b. Bersifat memaksa
- c. Berdasarkan Undang-undang
- d. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- e. Untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat

Dasar pemungutan pajak adalah UUD 1945 pasal 23A: “Pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

4. Fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN

a. Fungsi pajak

- 1) Fungsi budgeter, yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
- 2) Fungsi alokasi, yaitu pajak harus digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang
- 3) Fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan
- 4) Fungsi regulasi/stabilisasi, yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Manfaat pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri., membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.dengan demikian peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan **Wajib Pajak** dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal.

c. Pajak hubungannya dengan APBN

Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN, penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan sangat tergantung kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak. Selain pajak pusat, juga terdapat Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pembangunan I, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan APBD. Hasil Pajak dialokasikan untuk :

1. Pembangunan infrastruktur, meliputi : Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi dan lainnya
2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat , meliputi : Layanan Pendidikan , Penanggulangan Kemiskinan , Layanan kesehatan, Ketahanan pangan dan Subsidi
3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha, meliputi : Ketahanan Negara, Keamanan dan Ketertiban

5. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

Selain pajak, penerimaan pemerintah lainnya (bea ekspor dan impor, retribusi, bea meterai, sumbangan wajib, cukai, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan negara atau daerah.

Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya, sebagai berikut:

Dilihat Dari	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
Imbalan jasa (kompensasi)	Tidak diterima secara langsung	Diterima secara langsung
Dasar pemungutan	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dsb.
Cara perhitungan	Sendiri oleh wajib pajak	Oleh aparaturnegara
Jatuh tempo	Sesuai dengan tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian
Sanksi	Sesuai yang tercantum dalam UU	Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
Surat ketetapan pajak (kohir)	Ada	Tidak ada
Sifat pungutan	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN I

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Ciri-ciri apa saja yang terdapat pengertian Pajak ?
2. Identifikasikan fungsi pajak!
3. Identifikasikan peranan pajak yang dipungut oleh pemerintah !
4. Jelaskan pengertian istilah di bawah ini :
 - a. Retribusi
 - b. Cukai
 - c. Bea Masuk
 - d. Bea Keluar
 - e. Sumbangan
5. Jelaskan perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya !

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

Lakukanlah diskusi tentang permasalahan berikut dengan rekan kelompokmu!

1. Carilah informasi mengenai besarnya Pajak perdagangan selama 5 tahun terakhir dan penjelasannya, sekaligus cara meningkatkan penerimaan pajaknya!
2. Informasi bisa diperoleh melalui media massa maupun internet.
3. Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!



Materi Pertemuan 2

6. Asas pemungutan pajak

Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- a. **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. **Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. **Asas Convenience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. **Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

7. Jenis-jenis pajak atau Penggolongan Pajak

a. Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (PPn.BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
 - b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Golongannya atau Siapa yang Memungut Pajak

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

8. Sistem pemungutan pajak di Indonesia

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang ber-sangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sedangkan tarif pajak terdiri atas :

1. Tarif pajak proporsional (sebanding) Yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
2. Tarif pajak degresif (menurun) Yaitu tarif pajak dengan menggunakan presentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak.
3. Tarif pajak konstan (tetap) Yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
4. Tarif pajak progresif (menaik) Yaitu tarif pajak dengan persentase yang semakin menaik/meningkat untuk dasar setiap pengenaan pajak

9. Alur administrasi perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Perpajakan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk memudahkan dalam memahami kewajiban maupun hak wajib pajak, maka diperlukan pemahaman ketentuan formal maupun material perpajakan. Ketentuan normal diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sementara ketentuan material diatur dalam UU PPh maupun UU PPN/PPn BM. Sehingga secara administratif kewajiban maupun hak wajib pajak antara lain :

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Menghitung besarnya pajak terutang
- c. Memotong atau memungut pajak pihak lain
- d. Melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong/dipungut
- e. Melaporkan pajak yang terutang
- f. Menyelenggarakan pembukuan
- g. Kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pajak
- h. Meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak
- i. Pengajuan pembetulan ketetapan pajak
- j. Mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak
- k. Mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif
- l. Pengajuan pembatalan ketetapan pajak
- m. Mengajukan penghapusan NPWP

Undang-undang KUP antara lain mengatur tata cara pendaftaran, tata cara penghapusan, tata cara pembayaran, dan tata cara keberatan. UU PPh dan UU PPN/PPn BM antara lain mengatur penghitungan, pemotongan dan pemungutan pajak dan besarnya tarif pajak.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 2

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Jelaskan perbedaan tarif pajak progresif, proporsional, degresif, regresif dan konstan !
2. Identifikasikan Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya!
3. Berikan contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung!
4. Dari tiga macam sistem pemungutan pajak yang ada, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang mana? Jelaskan!
5. Bagaimana alur administrasi perpajakan di Indonesia?

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

Tugas Mandiri :

Carilah data melalui internet tentang Pajak apa saja yang tergolong menggunakan system pemungutan pajak berdasarkan pajak progresif, proporsional, degresif, regresif dan tarif pajak konstan! Dan Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!

Materi Pertemuan 3**Objek dan cara pengenaan pajak**

Subjek pajak adalah pihak – pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak yaitu sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak.

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya.

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang ini berisi dua bab, yaitu :

1. Bab I Tentang Pengertian dasar yang berkaitan dengan Pajak dan Perhitungan pajak.
2. Bab II Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak.

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan **PKP (Penghasilan Kena Pajak)** dan **PKP = Penghasilan persih pertahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 36 tahun 2008, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu:

- a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk

- seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Tarif Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas penghasilan sebagai berikut :

- a. wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (limapuluhjuta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta ruph)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Contoh 1 :

Penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi, Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000,00. Maka Pajak Penghasilan yang terutang:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 &= \text{Rp } 30.000.000,00 \\
 25\% \times \text{Rp } 250.000.000,00 &= \text{Rp } 62.500.000,00 \\
 30\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 &= \underline{\text{Rp } 30.000.000,00 (+)} \\
 &= \text{Rp } 125.000.000,00
 \end{aligned}$$

Contoh 2 :

Pak Chandra sebagai karyawan Primagama, penghasilan neto setiap bulannya Rp 10.000.000,00. Pak Chandra sudah beristeri tidak bekerja dan mempunyai 4 anak.

Berapakah pajak terutang setiap bulannya ?

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan neto 12 bulan} \times \text{Rp } 10.000.000,00 &= \text{Rp } 120.000.000,00 \\
 \text{PTKP - wajib pajak} &\text{Rp } 24.300.000,00 \\
 \text{- isteri} &\text{Rp } 2.025.000,00 \\
 \text{- anak (maks 3)} & \\
 3 \times \text{Rp } 2.025.000,00 &= \underline{\text{Rp } 6.075.000,00 +}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 32.400.000,00 - \\
 \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} &= \text{Rp } 87.600.000,00
 \end{aligned}$$

Jadi, PPh terutang

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 37.600.000,00 &= \underline{\text{Rp } 5.640.000,00 +} \\
 &= \text{Rp } 8.140.000,00 \text{ per tahun} \\
 &=====
 \end{aligned}$$

Pajak penghasilan perbulan = Rp 8.140.000,00 : 12 = Rp 678.333,33

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah : 28% (dua puluh delapan persen) pada tahun 2009 dan 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00 pada tahun 2012

Maka Pajak Penghasilan yang terutang: $25\% \times \text{Rp}1.250.000.000,00 = \text{Rp}312.500.000,00$

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 3

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Hal-hal apa saja yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti yang terdapat dalam UU nomor 28 tahun 2007?
2. Wajib Pajak A mempunyai istri dan 4 orang anak. Hitunglah besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberikan oleh Wajib Pajak A tersebut. Jika istrinya mempunyai penghasilan yang digabung dengan suaminya, maka hitunglah besarnya PTKP wajib pajak tersebut !
3. Seorang wajib pajak mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 75.000.000,00. Hitunglah besarnya Pajak Penghasilan !
Dan jika besarnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 45.000.000,00 hitunglah besarnya pajak terutang !
4. Tuan Darmono mempunyai istri dan 3 orang anak. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk jangka waktu bulan tersebut !
5. Tuan Frida seorang pegawai perusahaan dengan gaji per bulan Rp. 4.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp. 150.000,00 per bulan, membayar iuran jaminan sosial Rp. 200.000,00 per bulan serta membayar iuran THT Rp. 50.000,00 per bulan. Tuan Frida belum menikah. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotongkan setiap bulannya dan buatlah jurnalnya !

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS KELOMPOK

4. Carilah data melalui internet tentang Besarnya PPh Indonesia selama 5 tahun terakhir!
5. Carilah pula data melalui internet tentang besarnya PPh salah satu Negara di luar negeri selama 5 tahun terakhir
6. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara meningkatkan PPh tersebut!
7. Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!

Materi Pertemuan 4

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tarif PPN dan PPn BM

Menurut Pasal 7 UU nomor 42 tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - e. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - g. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), menurut Pasal 8, adalah:

- (1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen).
- (2) Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Mulai tanggal 1 Januari 2014 PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah. Untuk PBB Perkebunan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan menurut nilai jualnya

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

- a. objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (masjid, gereja, wihara, rumah sakit, pesantren/madrasah, panti asuhan, museum, candi)
- b. objek pajak yang digunakan kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah desa
- c. objek pajak untuk perwakilan diplomatik, konsulat
- d. objek pajak yang digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional (PBB, ASEAN, dan lain-lain)

Tarif PBB

Tarif PBB yang dikenakan pada obyek pajak adalah 0,5% dari nilai jual obyek kena pajak. Dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling

rendah sebesar Rp. 6.000.000,00 dan paling tinggi Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Dasar pengenaan PBB antara lain :

1. Dasarnya adalah nilai jual obyek pajak.
 2. Besarnya nilai jual obyek pajak ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
 3. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 4. Besarnya Nilai jual kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
 5. Objek PBB yang NJOP lebih dari Rp 1 milyar, Dasar perhitungannya 40%
- e. **Peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Meterai**
 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, besarnya bea meterai sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat lamaran sebesar Rp 6.000,00
 - b. Dokumen nominal Rp 250.000,00 – Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 3.000,00
 Lebih dari Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 6.000,00
 - c. Cek dan bilyet giro sebesar Rp 3.000,00

Tantangan pemungutan pajak

Peran vital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi yang diamanahi tugas penghimpun penerimaan negara harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan, artinya belum sebanding antara besarnya jumlah penduduk dengan Wajib Pajak yang masih rendah. Padahal penerimaan pajak banyak dialokasikan untuk fasilitas umum yang banyak dinikmati oleh seluruh jumlah penduduk.

Terkadang, masyarakat banyak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Dan ada banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan diatas Panghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 24,3 Juta/ Tahun yang dapat menjadi target sosialisasi. Menilik kepada situasi ini, sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus kian gencar dijalankan hingga ke jajaran yang terdekat dengan masyarakat serta dengan melibatkan unsur pemerintahan lokal sebagai pendukung. Sosialisasi secara umum dapat dibedakan menjadi sosialisasi langsung kepada sasaran dan ada juga dengan cara yang koersif positif. Cara yang kedua ini adalah dengan menjadikan NPWP sebagai unsur pokok setiap pemenuhan kewajiban administratif publik yang dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat akan tergerak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP. Khususnya mereka yang berpenghasilan bersih di atas PTKP.

Simulasi fungsi dan manfaat pajak

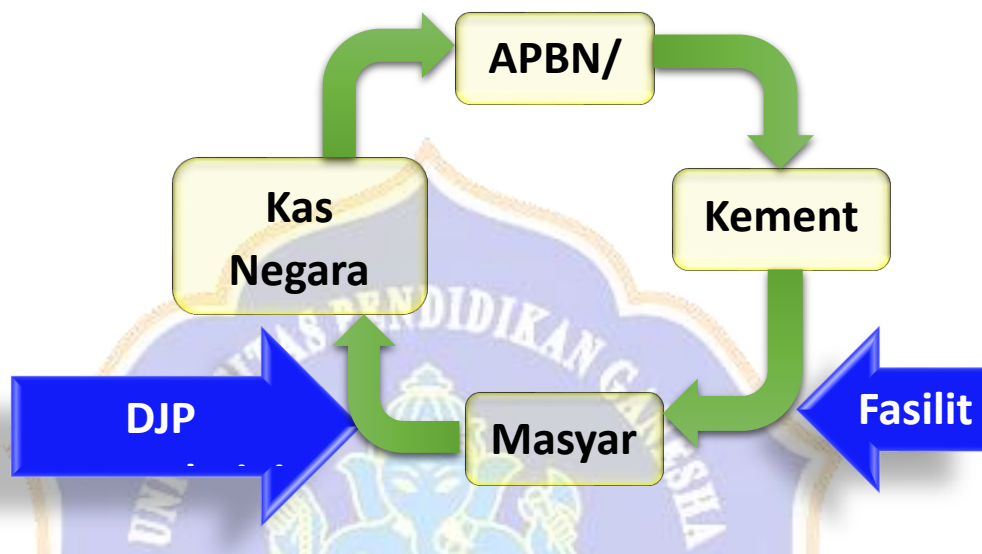
Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pajak mengajak peran serta **rakyat Indonesia** untuk membiayai negaranya sendiri, untuk itulah pajak memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting dalam pembangunan negara.

Terdapat aspek-aspek yang terkait dengan Perpajakan :

- a. Aspek Ekonomi, artinya penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dengan melakukan pembangunan.
- b. Aspek Sosial, artinya pemerataan pembangunan dan keadilan dalam membayar pajak.

- c. Aspek Politik, artinya secara politis masyarakat/pembayar pajak mempunyai posisi yang semakin baik dalam melakukan "tawar menawar" dengan pemerintah.
- d. Aspek Hukum, artinya Sebagai negara hukum semua pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan hukum.
- e. Aspek Agama, artinya Tuhan memerintahkan bahwa manusia, selain harus beribadat yaitu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan juga harus dapat berhubungan baik dengan sesamanya, saling berkomunikasi, bersilaturahmi dan saling membantu.

Untuk lebih menjelaskan fungsi dan manfaat pajak, berikut disajikan gambar alur penerimaan dan penggunaan dana APBN/APBD



INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 4

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Jelaskan pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)!
2. Bagaimana tarif Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah?
3. Sumadi mengimpor barang mewah dengan PPn BM 35 %. Jika harga barang senilai Rp. 400.000.000,00 maka jumlah yang dibayar oleh Sumadi sebesar berapa ?
4. Pada tahun 2013 Tuan Bagus memiliki sebidang tanah 1000 m² dengan NJOP Rp. 300.000,00/m², dan bangunan seluas 400 m² dengan NJOP Rp. 350.000,00/m². Taman mewa 200 m² dengan NJOP Rp. 50.000,00/m² dan pagar mewa 240 m² dengan NJOP Rp. 175.000,00/m². Hitunglah besarnya PBB yang terutang tahun 2013 !
5. Tantangan apa saja dalam pemungutan pajak di Indonesia

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI PESERTA DIDIK

1. Carilah data melalui internet tentang PBB yang diperoleh salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia selama 5 tahun terakhir!
2. Berikan penjelasan seperlunya data PBB tersebut!
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota tersebut dalam meningkatkan penerimaan PBBnya?
4. Diskusikan dengan kelompokmu
5. Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!

PENILAIAN LAPORAN**Penilaian kompetensi ketrampilan : Penilaian Proyek**

KD	IPK
4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi	4.7.1. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak

Satuan pendidikan : SMA NEGERI 1 Marga
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Kelas/Semester : XI/2
 Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik/Kelompok	Skor Perolehan					Jml
		Kerjasama kelompok	Kecepatan pengerjaan	Ketepatan pengerjaan	Tehnik presentasi	Laporan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai akhir ketrampilan :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{5}$$

Penilaian kompetensi ketrampilan : Portofolio

KD	IPK
4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi	4.7.1. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak

Satuan pendidikan : SMA NEGERI 1 Marga
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Kelas/Semester : XI/2
 Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik	SKOR			Nilai Akhir
		Ketepatan waktu	Kerapihan	Kebenaran Jawaban	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Perolehan Score}}{3}$$

SOAL ULANGAN HARIAN

2. Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah Pusat Indonesia adalah dari:
 - A. cukai
 - B. bea masuk
 - C. pajak penghasilan
 - D. pajak pertambahan nilai
 - E. pajak bumi dan bangunan

3. Dampak langsung pengenaan pajak atas suatu barang ialah....
 - A. kenaikan harga barang yang bersangkutan
 - B. meningkatnya laju inflasi
 - C. berkurangnya produksi atau pasokan (*supply*) barang tersebut
 - D. berkurangnya penjualan (permintaan terhadap) barang tersebut
 - E. meningkatnya penerimaan atau pendapatan pemerintah

4. Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek tertentu dinamakan
 - A. *Public Assessment System*
 - B. *Self Assessment System*
 - C. *Official Assessment System*
 - D. *Corporate Assessment System*
 - E. *With holding System*

5. Menurut Adam Smith, prinsip dalam pemungutan pajak (yang sering disebut sebagai “*The Four Maxims*”) adalah berikut ini, kecuali
 - A. Prinsip kesamaan/keadilan (*equation*)
 - B. Prinsip kepastian (*certainly*)
 - C. Prinsip redistribusi pendapatan (*redistribution of income*)
 - D. Prinsip ketepatan waktu (*convenience of payment*)
 - E. Prinsip ekonomis (*economics of collection*)

6. Pemerintah Daerah Sumatra Selatan berencana memberikan porsi pembagian pajak yang lebih besar pada tahun anggaran 2015 untuk pemerataan pembangunan bagi daerah tertinggal dan daerah miskin. Dalam hal ini berarti pajak melakukan fungsi
 - A. Alokasi
 - B. Distribusi
 - C. Mengatur
 - D. Stabilitas
 - E. Pembiayaan

7. Dalam rangka meningkatkan produksi perfilman nasional dan juga rasa cinta terhadap produksi dalam negeri, pemerintah berencana akan menaikkan pajak impor terhadap film asing dan juga barang-barang impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini berarti pajak tersebut mempunyai fungsi
 - A. Distribusi
 - B. Moneter
 - C. Budgeter
 - D. Keadilan
 - E. Regulasi

8. Tarif pajaknya tetap, tetapi semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, maka system pajak tersebut adalah ...
- 1) Progresif
 - 2) Proporsional
 - 3) Tarif tetap
 - 4) Degresif
 - 5) Regresif
9. Pada system pajak penghasilan progresif, penghasilan seseorang yang semakin tinggi dikenakan
- A. Jumlah pajak yang semakin besar
 - B. Jumlah pajak yang semakin kecil
 - C. Tarif pajak yang semakin besar
 - D. Tarif pajak yang semakin kecil
 - E. Pajak yang adil
10. Dari segi pemungutannya Pajak Penjualan (PPn) tergolong sebagai pajak yang bersifat...
- A. progresif
 - B. sukarela
 - C. paksaan
 - D. langsung
 - A. tak langsung

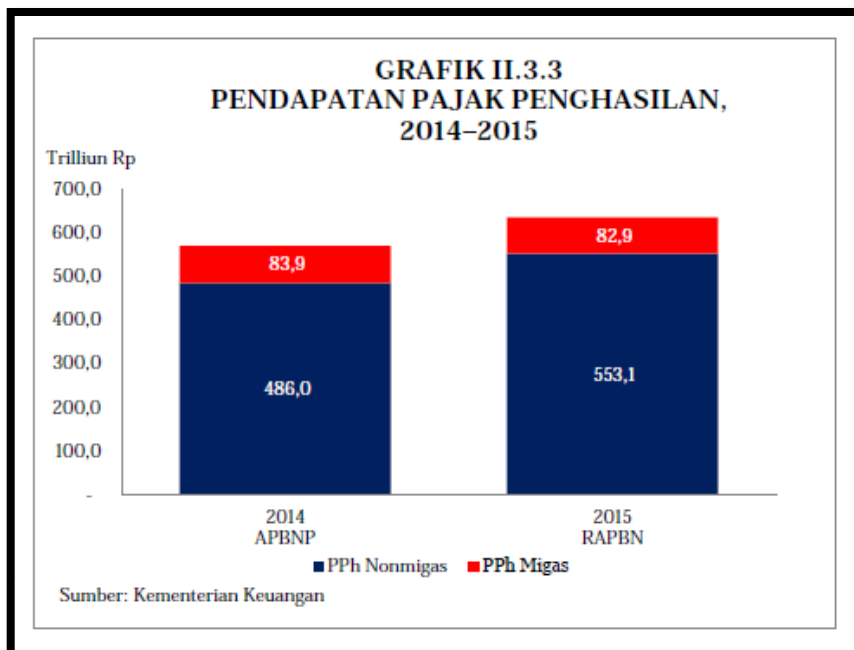
11. Tabel di bawah ini hasil perhitungan pajak dari berbagai tarif pajak :

Penghasilan	Besar pajak yang dibayarkan				
	Tarif I	Tarif II	Tarif III	Tarif IV	Tarif V
Rp 20.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Rp 30.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 5.400.000,00
Rp 40.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 6.400.000,00

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa

- A. Tarif I konstan dengan persentase pajaknya meningkat
 - B. Tarif II proporsional dengan persentase pajak meningkat
 - C. Tarif III progresif dengan persentase pajaknya meningkat
 - D. Tarif IV degresif dengan hasil perhitungan pajaknya meningkat
 - E. Tarif V regresif dengan persentase pajaknya meningkat
12. UU No. 36 Tahun 2008 menentukan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan, yaitu 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010. Untuk Wajib Pajak Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Pada tahun 2009 PT Makin Jaya (belum go public) memperoleh penghasilan bersih selama setahun sebesar Rp405.500.000,00. Dengan demikian, pajak penghasilan terutang dari PT Makin Jaya adalah....
- A. Rp81.100.000,00
 - B. Rp93.265.000,00
 - C. Rp101.375.000,00
 - D. Rp104.150.000,00
 - E. Rp113.540.000,00

13. Grafik berikut ini merupakan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia :



Analisis pendapatan negara dari pajak penghasilan yang benar adalah

- Persentase PPh Migas tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2015
 - Persentase PPh Nonmigas tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2015
 - Kenaikan PPh Migas tahun 2015 lebih besar dari pada kenaikan PPh Nonmigas
 - Kenaikan PPh Migas tahun 2015 lebih kecil dari pada kenaikan PPh Nonmigas
 - Kenaikan PPh Nonmigas lebih besar dari pada penurunan PPh Migas
14. Ibu Ida memiliki sebidang tanah dengan panjang 25 meter dan lebar 10 meter. Di atas tanah tersebut didirikan bangunan dengan panjang 10 meter dan lebar 7 meter. Di daerah tersebut harga tanah per meter persegi Rp2.000.000,00 dan bangunan Rp2.100.000,00. Apabila tarif PBB 0,2% dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp12.000.000,00, maka pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Ibu Ida adalah
- Rp 1.270.000,00
 - Rp 1.000.000,00
 - Rp 706.000,00
 - Rp 270.000,00
 - Rp 127.000,00
15. Bapak Abdul hakim menempati rumahnya sendiri dengan luas tanah 200 m² dengan nilai jual per m² adalah Rp 400.000,00, luas bangunan 100m² dengan nilai jual per m² adalah Rp 600.000,00, pagar sepanjang 10 m dengan tinggi 1,5 m nilai jual per m² Rp 200.000,00, nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp 12.000.000,00, bila tarif pajaknya 0,1% maka PBB-P2 terutang bapak Abdul hakim adalah
- Rp 60.500,00
 - Rp 118.000,00
 - Rp 131.000,00
 - Rp 133.000,00
 - Rp 145.000,00
16. Pak Sidarta seorang karyawan dari suatu perusahaan memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) per bulan Rp 8.750.000,00

Tabel penghasilan dan tarif pajak

Penghasilan	Tarif
s.d. Rp 50.000.000,00	5%

Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pak Sidarta dalam satu tahun adalah ...

- Rp 2.500.000,00
- Rp 8.250.000,00
- Rp 10.500.000,00
- Rp 10.750.000,00
- Rp 15.750.000,00

17. Pak Suherman memperoleh penghasilan kena pajak dalam sebulan sebesar Rp50.000.000,00. Tabel tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PKP	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Rp500.000.000,00 ke atas	30%

Besar pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Suherman adalah

- Rp2.500.000,00
- Rp30.000.000,00
- Rp62.500.000,00
- Rp125.000.000,00
- Rp180.000.000,00

18. Seorang wajib pajak memiliki:

- Tanah seluas 2.000 m² dengan harga jual Rp300.000/m².
- Bangunan seluas 1.500 m² dengan harga jual Rp500.000/m².
- Pagar sepanjang 200 tinggi 2 m dengan harga jual Rp100.000/m².

Jika nilai bangunan tidak kena pajak sebesar Rp12.000.000,00, jika tarif PBB-P2 sebesar 0,1% maka besarnya PBB-P2 yang harus dibayar sebesar

- Rp 2.756.000,00
- Rp 1.390.000,00
- Rp 1.378.000,00
- Rp 1.338.000,00
- Rp 689.000,00

19. Berikut ini tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan kena pajak

- Di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak
- di atas Rp50 juta s.d Rp200 juta: 10 %
- di atas Rp50 juta s.d Rp250 juta: 10%
- di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta: 20%
- di atas Rp500 juta : 30%

20. Bu Vero seorang wirausaha yang bergerak dalam usaha boga/catering. Ia mempunyai tanah seluas 300 m² dengan nilai jual Rp 500.000/m². Bangunan rumah seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 700.000/m². Taman mewah 100 m² dengan nilai jual Rp 200.000/m² dan pagar mewah panjang 100 m dengan tinggi 1,5 m dengan nilai jual Rp 200.000/m². Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 10.000.000,00. Besarnya Pajak Bumi dan bangunan yang terutang Bu Vero jika tarif PBB-P2 0,1% adalah

- Rp 314.000,00
- Rp 322.000,00
- Rp 330.000,00

- D. Rp 628.000,00
E. Rp 644.000,00
21. Biaya pemberlakuan pajak oleh pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat termasuk biaya-biaya berikut ini, kecuali:
- Biaya pajak yang dibayarkan pada pemerintah oleh masyarakat
 - Biaya administrasi yang timbul terkait dengan pajak
 - Biaya pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat
 - Hilangnya surplus konsumen karena pajak
 - Hilangnya surplus produsen karena pajak
22. Hal berikut ini merupakan ciri pajak yang dapat dibedakan dengan ciri pungutan resmi lainnya, yakni
- bersifat memaksa
 - dipungut oleh pemerintah daerah saja
 - jatuh temponya disesuaikan dengan pemakaian
 - didasarkan pada Peraturan Pemerintah
 - balas jasa diterima secara langsung oleh pembayar pajak
23. Di antara ketentuan atau kebijakan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal ialah....
- kenaikan tarif bagi kendaraan yang melintasi jalan tol
 - pemberian keringanan pajak (*tax holiday*) bagi perusahaan baru
 - kenaikan atau penurunan *BI rate* (sukubunga SBI satu bulan)
 - perubahan giro wajib minimum (GWM) bagi bank-bank
 - keharusan BUMN untuk menyetorkan sebagian labanya ke kas negara
24. Bapak Suprpto mempunyai dan menempati sebuah rumah mewah di jalan Adyaksa dengan luas Tanah 600 m², luas bangunan 250 m², taman mewah 50 m² dan pagar mewah dengan panjang 20 m tinggi 1,5 m. Menurut data PBB nilai jual obyek pajak tanah Rp 800.000,00 permeter, bangunan Rp 600.000,00 permeter, taman mewah Rp 400.000,00 permeter dan pagar mewah Rp 200.000,00 permeter. Jika bangunan tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00, maka besarnya PBB Bapak Suprpto apabila tarif PBB-P2 sebesar 0,1% dalah
- | | |
|-------------------------|--------------------|
| A. Rp 642.000,00 | D. Rp 6.440.000,00 |
| B. Rp 644.000,00 | E. Rp 6.560.000,00 |
| C. Rp 656.000,00 | |
25. Perhatikan jenis pajak berikut!
- Pajak pertambahan nilai
 - Pajak penghasilan
 - Pajak bumi dan bangunan
 - Pajak perseroan
 - Pajak penjualan
- Berdasarkan jenis pajak di atas, yang termasuk pajak langsung ditunjukkan oleh nomor....
- (1), (2), dan (3)
 - (1), (3), dan (5)
 - (2), (3), dan (4)
 - (2), (4), dan (5)
 - (3), (4), dan (5)
26. Tuan Bagaskoro warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan bersumber dari Indonesia, tiap tahun aktif membayar pajak kepada pemerintah. Tuan Bagaskoro dalam

membayar pajak dan pelaporan pajak penghasilannya dipercayakan kepada pihak ketiga hal tersebut merupakan system pemugutan pajak....

- A. Official assesmen system
- B. Withholding system
- C. Multimatic system
- D. Economic official system
- E. Rental official sistem

Kunci Jawaban

- 1 C
- 2 A
- 3 E
- 4 C
- 5 A
- 6 E
- 7 B
- 8 C
- 9 E
- 10 C
- 11 E
- 12 A
- 13 A
- 14 C
- 15 B
- 16 E
- 17 D
- 18 E
- 19 C
- 20 E
- 21 A
- 22 B
- 23 B
- 24 C
- 25 B



Lampiran 6. Modul Pembelajaran *Problem-based blended learning*

**MODUL PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Sekolah	: SMA Negeri 1 Marga
Mata Pelajaran	: Ekonomi
Kelas / Semester	: XI / Dua
Materi Pokok	: APBN dan APBD
Alokasi Waktu	: 8 x 45 menit (4 kali pertemuan)

S. Kompetensi Inti

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.

- KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan **metakognitif** berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

T. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.6. Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	Pertemuan ke 1
	4.6.1 Menjelaskan pengertian APBN
	4.6.2 Mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBN
	4.6.3 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara
	4.6.4 Mengidentifikasi belanja Negara atau pengeluaran Negara
	4.6.5 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN
	4.6.6 Menjelaskan pengaruh APBN dalam perekonomian
	4.6.7 Menjelaskan kebijakan anggaran
	4.6.8 Mengidentifikasi macam-macam kebijakan anggaran
	Pertemuan ke 2
	4.6.9 Menjelaskan pengertian APBD
4.6.10 Mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBD	
4.6.11 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan	

	Daerah 4.6.12 Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran Daerah Pertemuan ke 3 4.6.13 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 4.6.14 Menjelaskan pengaruh APBD dalam perekonomian 4.6.15 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	5.6.1. Mempresentasikan hasil evaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan

U. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *Problem-based blended learning*, peserta didik dapat menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, dan Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama.

V. Materi Pembelajaran

APBN

- Pengertian APBN
- Fungsi dan tujuan APBN
- Sumber-sumber penerimaan negara
- Jenis-jenis belanja negara
- Mekanisme penyusunan APBN
- Pengaruh APBN terhadap perekonomian

APBD

- Pengertian APBD
- Fungsi dan tujuan APBD
- Sumber-sumber penerimaan daerah
- Jenis-jenis belanja daerah
- Mekanisme penyusunan APBD
- Pengaruh APBD terhadap perekonomian

W. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

- b. Pendekatan : *Saintifik*
- c. Model : *PBL-Blended Learning*
- d. Metode : *Offline dan Online Learning (Cooperative dan Independent Learning)*

Media Pembelajaran

Media/Alat : Laptop, LCD, Peta Konsep dan Power point

Sumber Belajar

- Buku Ekonomi untuk Kelas XI SMA Kurikulum 2013 (Tim MGMP Provinsi Bali)
- Ismawanto. 2017. Panduan Materi Sukses Olimpiade Sains Ekonomi Jilid 1 (Makro dan Mikro). Jakarta: Bina Prestasi Insani.
- Buku ekonomi lain yang relevan dan ber-isbn, internet dan nara sumber

Langkah-Langkah Pembelajaran

e. Pertemuan Minggu I

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>Orientasi pada masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu. Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pendapatan suatu negara yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi dan kondisi ekonomi masyarakat sehari – hari. Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini, yaitu; pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN serta sumber penerimaan negara dan belanja negara dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru. Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait dengan APBN. 	15 menit
Inti	<p>Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok. Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I, dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang pengertian APBN dan asas penyusunannya melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok III, dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang fungsi dan tujuan APBN dalam perekonomian melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Sumber-sumber penerimaan Negara dan jenis belanja negara dalam perekonomian melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 	150 menit
	<p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>. 	
	<p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat 	

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan.	
	<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas. b) Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas. c) Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>. d) Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan. 	
Penutup	<p>Mengakhiri pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. b) Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. c) Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i>. d) Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp grup</i> secara fleksibel. e) Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali. 	15 menit

f. Pertemuan Minggu II

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>Orientasi pada masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu. b) Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN serta sumber penerimaan negara dan belanja negara dalam perekonomian pendapatan suatu negara yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi dan kondisi ekonomi masyarakat sehari – hari. c) Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini yaitu; mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru. d) Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait dengan mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya. 	15 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Inti	<p>Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok. Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I dan II dan ditugaskan untuk melakukan kajian tentang mekanisme penyusunan APBN melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Pengaruh APBN dalam perekonomian secara rinci melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok, V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Kebijakan anggaran secara rinci melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 	150 menit
	<p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>. 	
	<p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan. 	
	<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas. Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas. Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>. Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan. 	
Penutup	<p>Mengakhiri pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 	15 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	b) Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. c) Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i> . d) Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp</i> grup secara fleksibel. e) Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali.	

g. Pertemuan Minggu III

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	Orientasi pada masalah <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu. Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait dengan mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya dalam perekonomian pendapatan suatu negara yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi dan kondisi ekonomi masyarakat sehari – hari. Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini yaitu; kebijakan anggaran dan APBD dan menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah daerah dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru. Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait dengan kebijakan anggaran dan APBD dan menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah daerah. 	15 menit
Inti	Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok. Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I, II dan III ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok IV, V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Sumber penerimaan daerah dan jenis belanja daerah secara rinci melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 	150 menit
	Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang 	

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<p>disediakan di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>c) Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>.</p>	
	<p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <p>a) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>c) Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan.</p>	
	<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <p>a) Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas.</p> <p>b) Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas.</p> <p>c) Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>.</p> <p>d) Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan.</p>	
Penutup	<p>Mengakhiri pembelajaran</p> <p>a) Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun.</p> <p>c) Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i>.</p> <p>d) Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp grup</i> secara fleksibel.</p> <p>e) Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali.</p>	15 menit

h. Pertemuan Minggu IV

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>Orientasi pada masalah</p> <p>a) Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu.</p> <p>b) Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kebijakan anggaran dan APBD dan menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dihubungkan</p>	15 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<p>dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi dan kondisi ekonomi masyarakat sehari – hari.</p> <p>c) Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini yaitu; sumber penerimaan daerah dan belanja daerah, serta mekanisme APBD dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru.</p> <p>d) Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait dengan sumber penerimaan daerah dan belanja daerah, serta mekanisme APBD.</p>	
Inti	<p>Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar</p> <p>a) Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I, II dan III ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya dalam perekonomian melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok IV, V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang mendeskripsikan APBN dan APBD melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. 	150 menit
	<p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <p>a) Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan.</p> <p>b) Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>c) Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>.</p>	
	<p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <p>a) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>c) Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan.</p>	
	<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <p>a) Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas.</p> <p>b) Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas.</p> <p>c) Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>.</p> <p>d) Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan.</p>	

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Penutup	<p>Mengakhiri pembelajaran</p> <p>a) Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun.</p> <p>c) Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i>.</p> <p>d) Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp</i> grup secara fleksibel.</p> <p>e) Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali.</p>	15 menit

X. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

9. Teknik Penilaian :

E. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis

F. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik dan Portofolio

10. Bentuk Penilaian :

A. Tes tertulis : Pilihan ganda dan Uraian beserta pedoman penilaian

B. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi dan pedoman penilaian

C. Portofolio : Pengumpulan tugas mandiri

11. Instrumen penilaian : terlampir

12. Alat Penilaian : Soal terlampir

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1Marga

Marga, 15 Juli 2022
Guru Mata Pelajaran
Ekonomi

I Wayan Kantun Arimbawa, S.Ag., M.Pd.H
NIP.196210091983011008

Siluh Made Surya Kartini, SE
NIP. 197704212010012014



Lampiran Materi Pembelajaran Materi Pertemuan I

APBN DAN APBD

B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. Pengertian APBN

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), setiap tahun Presiden mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, selanjutnya disebut **APBN**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun.

Penyusunan APBN didasarkan asas berimbang dan dinamis, artinya di sektor penerimaan negara selalu diusahakan peningkatan dan di sektor pengeluarannya diusahakan penghematan rutin serta lebih mengarahkan dana pembangunan kepada kegiatan yang menunjang peningkatan produksi nasional, yang mana besarnya pengeluaran (belanja) seimbang dengan penerimaannya.

Secara rinci penyusunan APBN didasarkan :

- f. Asas berimbang dan dinamis penerimaan-pengeluaran
- g. Tabungan/Saving selalu meningkat
- h. Peningkatan pendapatan pajak, secara : intensif dan ekstensif
- i. Prioritas pengeluaran rutin yang penting
- j. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia secara maksimal.

4. Fungsi dan tujuan APBN

Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dijelaskan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Atau dengan kata lain Fungsi alokasi, yaitu APBN dapat menunjukkan sasaran dan prioritas pembangunan dan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan **Public Goods** atau Kebutuhan umum akan terpenuhi
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Atau dengan kata lain Fungsi distribusi, yaitu APBN dapat menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor

- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Atau dengan kata lain Fungsi stabilisasi, yaitu APBN diharapkan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang dan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendali inflasi

5. Sumber-sumber Penerimaan Negara dan Jenis-Jenis Pengeluaran Negara

Berdasarkan pasal 11 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBN, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Sumber-sumber Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara (Postur RAPBN 2017)

SUMBER PENERIMAAN NEGARA
<p>A. PENDAPATAN NEGARA</p> <p>I. PENERIMAAN DALAM NEGERI</p> <p>1 . Penerimaan Perpajakan</p> <p>a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Pajak Penghasilan <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan PPh Migas b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan) 5) Pendapatan Cukai 6) Pendapatan Pajak Lainnya <p>b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Bea masuk 2) Pendapatan Bea keluar <p>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>a. Pendapataan Sumber Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan Sumber Daya Alam Migas <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan Minyak Bumi b) Pendapatan Gas Bumi 2) Penerimaan Sumber Daya Alam Non migas <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan Pertambangan Minerba (Mineral dan Batu Bara) b) Pendapatan Kehutanan c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi <p>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbankan 2) Non Perbankan

- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya
- d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

II. PENERIMAAN HIBAH

JENIS BELANJA NEGARA ATAU PENGELUARAN NEGARA

B. BELANJA NEGARA

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

- 1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga
- 2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga
 - a. Pembayaran bunga Utang Negara
 - 1) Utang Dalam Negeri
 - 2) Utang Luar Negeri
 - b. Pengelolaan Subsidi
 - 1) Subsidi Energi
 - 2) Subsidi Non Energi
 - c. Belanja Hibah

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

- 1. Transfer ke Daerah
 - a. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Transfer Umum
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam
 - b) Dana Alokasi Umum
 - 2) Dana Transfer Khusus
 - a) Dana Alokasi Khusus Fisik
 - b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - b. Dana Insentif Daerah
 - 1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
 - 2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
 - 3) Dana Bantuan Operasional Sekolah
 - 4) Dana Insentif Daerah
 - 5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY
 - 1) **Dana Otonomi Khusus**
 - a) Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
 - b) Dana Otsus Provinsi Aceh
 - c) Dana tambahan Otsus Infrastruktur (Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat)
 - 2) **Dana Keistimewaan DIY**
- 2. Dana Desa

C. KESEIMBANGAN PRIMER

D. SURPLUS (DIFISIT) ANGGARAN (A – B)

% Surplus (Defisit) Anggaran terhadap PDB

E. PEMBIAYAAN (I + II)

I. PEMBIAYAAN UTANG

- 1. Surat Berharga Negara (Neto)
- 2. Pinjaman (Neto) Dalam Negeri dan Luar Negeri

II. PEMBIAYAAN INVESTASI

- 1. Investasi Kepada BUMN
- 2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya
- 3. Investasi Kepada BLU (Badan Layanan Umum)
- 4. Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional
- 5. Penerimaan Kembali Investasi
- 6. Cadangan Pembiayaan Investasi

III. PEMBERIAN PINJAMAN

- 1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya

2. Cadangan Pemberian Pinjaman
- IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN**
1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
 2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN
- V. PEMBIAYAAN LAINNYA**
1. Saldo Anggaran Lebih
 2. Hasil Pengelolaan Aset

Sumber : Kementerian Keuangan 2016

Sedangkan tabungan Negara atau pemerintah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Tabungan Pemerintah} = \text{Penerimaan Dalam Negeri} - \text{Pengeluaran Rutin}$$

Semakin tinggi tabungan pemerintah atau Negara maka akan dapat meningkatkan investasi atau penanaman modal untuk usaha sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar atau dengan kata lain APBN menunjukkan **surplus**. Dan *Keseimbangan primer* adalah total penerimaan atau pendapatan Negara dikurangi belanja dalam APBN tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Jika berada dalam kondisi defisit, penerimaan negara tidak bisa menutup pengeluaran sehingga membayar bunga utang sudah menggunakan pokok utang baru.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN I

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

6. Jelaskan pengertian APBN dan UU yang mengatur penyusunan APBN!
7. Identifikasikan fungsi APBN!
8. Bagaimana tujuan penyusunan APBN?
9. Identifikasikan secara rinci sumber-sumber penerimaan Negara dalam APBN!
10. Identifikasikan secara rinci jenis-jenis pembelanjaan Negara!

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

Lakukanlah diskusi tentang permasalahan berikut dengan rekan kelompokmu!

1. Carilah informasi mengenai APBN pada tahun terakhir dan penjelasannya
2. Informasi bisa diperoleh melalui media massa maupun internet.
3. Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi.

Materi Pertemuan 2

A. MEKANISME PENYUSUNAN APBN DA PENGARUHNYA DALAM PEMBANGUNAN

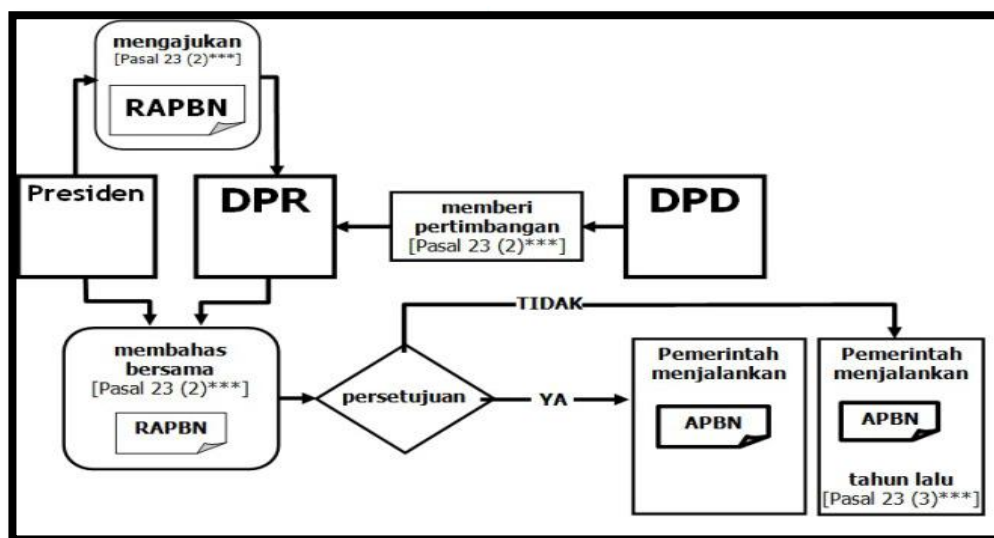
1. Mekanisme penyusunan APBN

Berdasarkan pasal 15 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBN, dijelaskan proses penyusunan APBN sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

- (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Proses penyusunan APBN secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



2. Pengaruh APBN terhadap perekonomian

6. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun.
7. Dapat menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, sebabnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.
8. Dapat menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri.
9. Dapat memperlancar Distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta yang lainnya.
10. Dapat memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Pada gilirannya akan terbentuk tabungan masyarakat sehingga meningkatkan investasi yang menyebabkan semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Penyusunan APBN dapat juga mempengaruhi inflasi/deflasi yang akan terjadi dimasyarakat

3. Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur APBN agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Tujuan kebijakan anggaran adalah menentukan arah dan tujuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari rencana kerja tahunan pemerintah.

Sedangkan macam-macam Kebijakan Anggaran

- e. Anggaran Seimbang (balance budget)
Semua pengeluaran didasarkan pada penerimaan. Pada akhirnya, jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan. Tujuan penyusunan anggaran seimbang adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran defisit
- f. Anggaran Dinamis
Dalam anggaran dinamis berarti bahwa jumlah mutlak dari anggaran dari tahun ke tahun semakin besar.
- g. Anggaran Defisit
Penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. Kebijakan ini dijalankan karena pemerintah akan memperbaiki keadaan perekonomian negara yang sedang menurun atau dilanda deflasi. Dalam hal ini pemerintah menutup kekurangan anggaran dengan pinjaman dalam dan luar negeri
- h. Anggaran Surplus
Penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi untuk menyesuaikan anggaran dengan kenaikan harga barang/jasa. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan penerimaan negara (pajak dan nonpajak) dan penghematan.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 2

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

6. Bagaimana mekanisme penyusunan APBN? Jelaskan!
7. Gambarkan secara bagan mekanisme penyusunan APBN!
8. Apabila rancangan penyusunan APBN tidak disetujui oleh DPR, apa yang dilakukan oleh pemerintah?
9. Identifikasikan pengaruh penyusunan APBN terhadap perekonomian suatu Negara!
10. Apakah APBN dapat mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi? Jelaskan!

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

Tugas :

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

Carilah data melalui internet tentang sumber penerimaan Negara yang tercantum dalam APBN selama 5 tahun terakhir dan APBN salah satu Negara maju, kemudian diskusikan penjabarannya! Dan Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!

Materi Pertemuan 3

C. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Pengertian APBD

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disebut **APBD**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan yang disetujui oleh DPRD.

10. Fungsi dan Tujuan APBD

Fungsi dan tujuan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya perbedaannya ruang lingkup APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dalam APBD akan tercermin pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

11. Sumber-sumber penerimaan daerah dan Jenis-jenis pengeluaran daerah

Berdasarkan pasal 16 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBD, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Sumber-sumber Penerimaan Daerah.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah d. Penerimaan dari Dinas-dinas daerah e. Penerimaan lain-lain 3. Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak g. Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat h. Dana Alokasi Khusus (DAK) i. Dana perimbangan j. Pinjaman pemerintah daerah k. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) l. Lain-lain pendapatan yang sah
Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran belanja rutin <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja DPRD

- b. Belanja Kepala Daerah
 - c. Belanja Pegawai
 - d. Belanja Barang
 - e. Belanja Pemeliharaan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas
 - g. Belanja lain-lain
 - h. Angsuran pinjaman dan bunga
 - i. Subsidi kepada daerah bawahan
 - j. Pengeluaran yg tidak termasuk bagian lain
 - k. Pengeluaran tak terduga
2. Anggaran Belanja Pembangunan
- a. Proyek-proyek daerah
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah
 - c. Proyek-proyek pembangunan

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 3

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Terangkan apa yang dimaksud dengan kebijakan Fiskal dan Kebijakan Anggaran !
2. Identifikasikan kebijakan anggaran!
3. Jelaskan pengertian APBD dan peraturan yang mengatur penyusunan APBD!
4. Jelaskan fungsi dan tujuan penyusunan APBD!
5. Dalam APBD terdapat sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Jelaskan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pusat!

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS MANDIRI

1. Carilah data melalui internet tentang peraturan yang mengatur tentang penyusunan APBD!
2. Carilah data melalui internet tentang kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia!
3. Tulislah di buku tugasmu untuk dilaporkan kepada Gurumu!

Materi Pertemuan IV

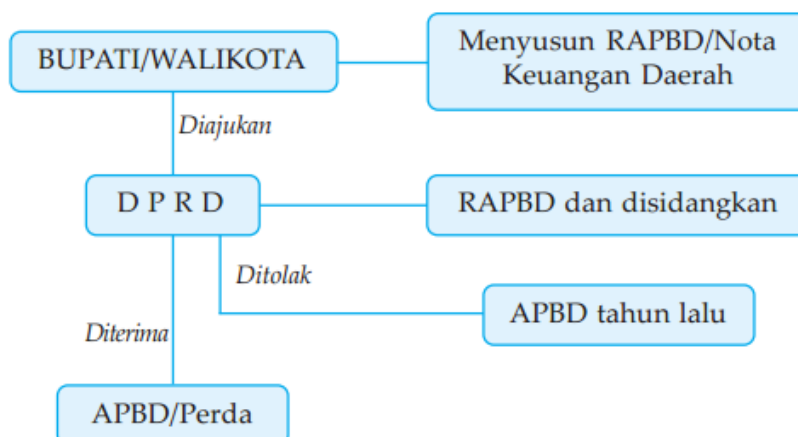
E. MEKANISME PENYUSUNAN APBD DAN PENGARUHNYA DALAM PEMBANGUNAN

1. Mekanisme penyusunan APBD

Berdasarkan pasal 20 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBD, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Proses penyusunan APBD secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



2. Pengaruh APBD terhadap perekonomian

Pengaruh APBD terhadap perekonomian sama dengan pengaruh APBN terhadap perekonomian, hanya perbedaannya ruang lingkup APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 4

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

6. Jelaskan Perbedaan antara APBN dan APBD !
7. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Identifikasikan sumber Pendapatan asli daerah !
8. Jelaskan jenis-jenis belanja pemerintah daerah!
9. Bagaimana mekanisme penyusunan APBD dan gambarkan proses penyusunan APBD?
10. Bagaimana pengaruh penyusunan APBD dalam perekonomian?

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI PESERTA DIDIK

1. Carilah data melalui internet tentang APBD salah satu provinsi dan Indonesia dan APBD salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia!
2. Berikan penjelasan seperlunya data APBD tersebut!
3. Diskusikan dengan kelompokmu
4. Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!



PENILAIAN LAPORAN**Penilaian kompetensi ketrampilan : Penilaian Proyek**

KD	IPK
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	4.6.2. Mempresentasikan hasil evaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan

Satuan pendidikan : SMA NEGERI MARGA
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Kelas/Semester : XI/2
 Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik/Kelompok	Skor Perolehan					Jml
		Kerjasama kelompok	Kecepatan pengerjaan	Ketepatan pengerjaan	Tehnik presentasi	Laporan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai akhir ketrampilan :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{5}$$

Penilaian kompetensi ketrampilan : Portofolio

KD	IPK
4.6. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi	4.6.2. Mempresentasikan hasil evaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan

Satuan pendidikan : SMA NEGERI 1 MARGA

Tahun pelajaran : 2022/2023

Kelas/Semester : XI/2

Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik	SKOR			Nilai Akhir
		Ketepatan waktu	Kerapihan	Kebenaran Jawaban	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Perolehan Score}}{3}$$

SOAL ULANGAN HARIAN

1. Pada APBN tahun 2014/2015 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:

- 9) Hibah
- 10) Pembayaran cicilan Utang
- 11) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 12) Pajak perdagangan internasional
- 13) Subsidi BBM
- 14) Bagian pemerintah atas laba BUMN
- 15) Migas
- 16) Pembiayaan Pembangunan

Dari uraian sumber pendapatan dan belanja negara tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah

- F. 1), 2), 3), dan 4)
- G. 2), 3), 5), dan 7)
- H. **3), 4), 6), dan 7)**
- I. 4), 5), 7), dan 8)
- J. 5), 6), 7), dan 8)

26. Ringkasan APBN 2013 – 2015 (dalam Miliar Rupiah) :

No.	Keterangan	2013	2014	2015
B.	Belanja Negara	1.294.999,2	1.548.310,4	1.681.011,1
I.	Belanja Pemerintah Pusat	883.722,0	1.069.534,4	1.154.380,9
II.	Transfer ke Daerah	411.324,8	478.775,9	528.630,2
	1. Dana perimbangan	347.246,2	408.352,1	444.798,8
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64.078,6	70.423,9	83.831,5

Berdasarkan data tersebut maka dampak APBN untuk masyarakat adalah

- A. **belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga belum mencerminkan upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat**
- B. belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya percepatan kesejahteraan masyarakat
- C. belanja negara yang menitikberatkan belanja pemerintah akan mempercepat pengentasan kemiskinan di masyarakat
- D. belanja negara dititikberatkan pada dana transfer ke daerah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi
- E. belanja negara yang menitikberatkan pada transfer dana otonomi daerah akan mempercepat peningkatan pendapatan nasional

27. Berikut ini sebagian APBD salah satu provinsi di Indonesia (dalam triliun rupiah) :

A	Pendapatan	
	- PAD	Rp 7.585
	- Dana perimbangan	Rp 5.770
B	- Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 109
	Belanja	
	1. Aparatur	
	- Belanja administrasi umum	Rp 2.414
	- Belanja operasi dan pemeliharaan	Rp 1.286

- Modal	Rp 648
2. Publik	
- Belanja administrasi umum	Rp 2.218
- Belanja operasi dan pemeliharaan	Rp 2.692
- Modal	Rp 2.757

Berdasarkan data di atas dampak terhadap kegiatan ekonomi adalah

- APBD tersebut defisit sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang
- APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah bertambah
- APBD tersebut surplus sehingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berkurang
- pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengatur dana karena APBD defisit
- terjadi keseimbangan APBD, sehingga pelayanan pemerintah daerah tersebut stabil

28. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- Menjual surat-surat berharga
- Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri tahun depan
- Pemerintah menghapus adanya subsidi BBM
- Belanja layanan publik di setiap instansi
- Pembangunan untuk sektor lembaga

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah

- (1), (2), dan (3)
- (1), (3), dan (4)
- (2), (3), dan (4)
- (2), (4), dan (5)
- (3), (4), dan (5)

29. Awal tahun 2014 Indonesia mendapat bantuan berupa utang luar negeri dengan syarat lunak dari CGI sebesar 3,4 Miliar Dolar AS. Utang luar negeri tersebut pada dasarnya dapat menguntungkan dan merugikan bangsa Indonesia, antara lain:

- Mengangkat martabat bangsa Indonesia dengan meningkatnya pertumbuhan
- Indonesia dapat menjadi negara yang ketergantungan dari utang luar negeri
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Mendorong laju pertumbuhan di daerah
- Pembayaran cicilan utang luar negeri memberatkan APBN

Keburukan dari mendapat bantuan berupa utang luar negeri adalah

- 1 dan 2
- 2 dan 3
- 2 dan 5
- 3 dan 4
- 4 dan 5

30. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari:

- pajak penghasilan
- pajak kendaraan bermotor
- pajak pertambahan nilai
- pajak tontonan
- pajak impor
- pajak bumi dan bangunan desa dan kota

Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah daerah adalah

- 1, 2, dan 3
- 1, 3, dan 5

- c. 2, 4, dan 6
- d. 3, 4 dan 5
- e. 4, 5 dan 6

31. Beberapa pernyataan fungsi dan tujuan APBN sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana yang dimiliki pemerintah untuk belanja setiap departemen.
2. Sebagai dasar untuk menetapkan proyek pemerintah yang harus dibiayai sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
4. Sebagai pedoman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Membagikan dana, tidak hanya untuk kepentingan umum, melainkan untuk subsidi dan dana pensiun.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk fungsi APBN adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (4), dan (5)
- E. (3), (4), dan (5)

32. Berikut ini fungsi dan tujuan APBN:

- (6) Pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara
- (7) Pedoman untuk merencanakan kegiatan yang mendukung pembelanjaan
- (8) Pedoman untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja
- (9) Pedoman untuk kegiatan penyelenggaraan negara
- (10) Pedoman untuk menetapkan kebijakan ekonomi

Yang merupakan fungsi APBN adalah

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)**
- C. (1), (4), dan (5)
- D. (2), (4), dan (5)
- E. (3), (4), dan (5)

33. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I (Propinsi) proses penyusunannya adalah

- a. Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh DPR RI
- b. Disusun oleh pemerintah daerah tingkat I, lalu mendapat persetujuan presiden untuk disahkan oleh DPR RI
- c. Disusun bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD tingkat I lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR RI
- d. Disusun oleh pemerintah daerah tingkat I dan disahkan oleh DPRD tingkat I setempat**
- e. Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh presiden

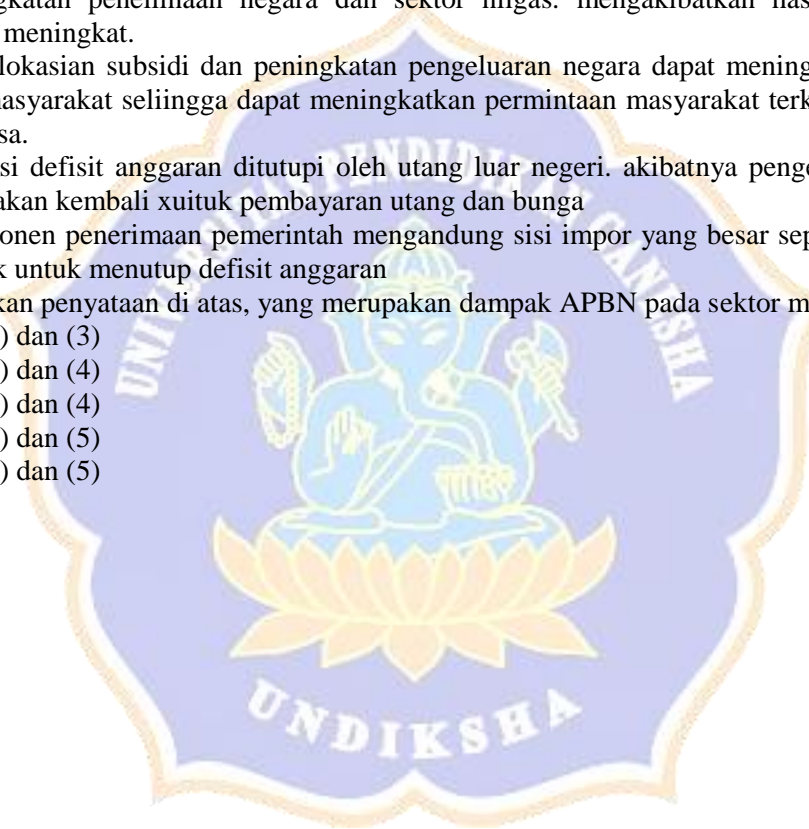
34. Anggaran pendapatan dan belanja Negara pemerintah pusat sebuah Negara diketahui berjumlah total \$ 900 miliar, penerimaan dari sumber-sumber dalam negerinya sebesar \$ 700 miliar, sedangkan belanja atau pengeluaran untuk keperluan rutin senilai \$ 600 miliar. Bertolak dari informasi ini, tabungan pemerintah Negara tersebut adalah sebesar

- f. \$ 100 miliar**
- g. \$ 200 miliar
- h. \$ 300 miliar
- i. \$ 400 miliar
- j. \$ 1.000 miliar

35. Tunjukkan ayat belanja barang yang mana di bawah ini yang TIDAK TERMASUK di dalam neraca APBN....
- belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Keuangan
 - belanja barang-barang kebutuhan Bank Sentral (Bank Indonesia)**
 - belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Pertahanan
 - belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Luar Negeri
 - belanja barang-barang kebutuhan Kementerian Luar Negeri
36. Jenis pajak dalam APBN Indonesia adalah
- Biaya fiskal ke luar negeri
 - Cukai**
 - Denda / tilang
 - PPN-BM
 - Laba BUMN
37. Di Indonesia pajak yang sebagian hasil pemungutannya diserahkan/dkembalikan ke daerah (kabupaten, kota dan provinsi) ialah....
- Pajak penjualan
 - Pajak penghasilan
 - Cukai dan bea impor
 - Pajak pertambahan miai
 - Pajak bumi dan bangunan**
38. Pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lain diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat umum. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi
- stabilisasi
 - alokasi**
 - efisiensi
 - distribusi
 - pemeratan
39. Berikut ini yang bukan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah...
- pajak penghasilan warga daerah tersebut**
 - pajak reklame / iklan
 - pajak kendaraan bermotor
 - retribusi parkir
 - laba BUMD
40. Berikut ini adalah sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- PAD
 - DAU
 - Retribusi
 - DAK
 - Dana Bagi Hasil
- Dari sumber penerimaan APBD di atas, yang termasuk Dana Perimbangan adalah butir....
- 1, 2, dan 3
 - 1, 2, dan 5
 - 2, 3, dan 4
 - 2, 4, dan 5**
 - 3, 4, dan 5
41. Jika pemerintah menaikkan anggaran dalam dana perimbangan (DAK, DAU dan dana alokasi khusus) maka pengaruhnya dalam APBD adalah
- anggaran pengeluaran pemerintah daerah meningkat
 - anggaran penerimaan pemerintah daerah meningkat**
 - anggaran pemerintah daerah tetap

- d. anggaran pengeluaran pemerintah daerah menurun
e. anggaran penerimaan pemerintah daerah menurun
42. Komponen APBN dan APBD sebagai berikut:
1. Bea Pendapatan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pos retribusi
3. Bagi hasil dan bantuan keuangan
4. Bagian laba BUMN
5. Subsidi BBM dan non BBM
Yang merupakan komponen APBN adalah butir....
A. 1, 2, dan 3 D. 2, 3, dan 4
B. 1, 3, dan 4 E. **2, 4, dan 5**
C. 1, 4, dan 5
43. Ayat-ayat di bawah ini merupakan pengeluaran atau belanja rutin Pemerintah Pusat, KECUALI
A. pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan militer
B. pembayaran gaji pegawai BUMN
C. belanja barang-barang kebutuhan pemerintah pusat
D. pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri
E. pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi non-BBM
44. Secara teknis, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam hal ini adalah....
a. kementerian keuangan
b. bank sentral (BI)
c. badan perencanaan dan pembangunan nasional
d. presiden dan wakil presiden
e. kementerian keuangan, bappenas, dan bank sentral
45. Seorang gubernur yang baru terpilih dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah agar dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui pos dibawahini, KECUALI... .
(F) Pajak kendaraan bermotor
(G) bea balik nama kendaraan bermotor
(H) pajak bahan bakar kendaraan bermotor
(I) **pajak penerangan jalan**
(J) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
46. Misalkan diketahui bahwa $AE = 7.000.000.000 + 0,75y$. Berdasarkan persamaan tersebut, titik keseimbangan pendapatan akan berada pada besaran:
F. Rp. 8.000.000.000,00
G. Rp. 10.000.000.000,00
H. Rp. 20.000.000.000,00
I. Rp. 25.000.000.000,00
J. Rp. 28.000.000.000,00
- Keterangan:
AB : Pengeluaran keseluruhan (aggregate expenditure)
Y : PDB
47. Pemerintah Kota Solo akan membatasi agenda perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) dalam dan luar negeri mulai tahun depan. Hal ini dibahas sejak penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) APBD 2017.
- Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang mungkin terjadi adalah
F. Perjalanan dinas dan kunjungan kerja akan berangsur-angsur dikurangi
G. **Pengeluaran daerah kota Solo akan semakin efisien dibandingkan sebelumnya**
H. Pendapatan kota Solo dari sektor pariwisata daerah akan mengalami penurunan
I. Perjalanan dinas dan kunjungan kerja pemerintah kota Solo akan dihapuskan

- J. Selisih pengurangan anggaran dapat dimanfaatkan untuk kenaikan gaji pegawai honor
48. Pemenuhan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 20% dari total APBN akan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi.
Dampak positif bagi masyarakat atas penggunaan dana APBN adalah
- F. meningkatkan daya beli/konsumsi masyarakat terhadap barang/jasa
 - G. mendorong peningkatan pariwisata dalam negeri dan luar negeri
 - H. meningkatnya arus urbanisasi penduduk desa ke kota dengan cepat
 - I. mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di kota dan desa
 - J. **meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan**
49. Berikut ini dampak-dampak APBN terhadap sektor moneter, neraca pembayaran dan sektor produksi:
- (6) Peningkatan jumlah pengeluaran negara dalam APBN dapat meningkatkan jumlah yang beredar
 - (7) Peningkatan penerimaan negara dan sektor migas, mengakibatkan hasil penjualan migas meningkat.
 - (8) Pengalokasian subsidi dan peningkatan pengeluaran negara dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
 - (9) Kondisi defisit anggaran ditutupi oleh utang luar negeri, akibatnya pengeluaran rutin digunakan kembali untuk pembayaran utang dan bunga
 - (10) Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar seperti bantuan proyek untuk menutup defisit anggaran
- Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan dampak APBN pada sektor moneter adalah
- F. (1), (2) dan (3)
 - G. (1), (2) dan (4)
 - H. (2), (3) dan (4)
 - I. (2), (4) dan (5)
 - J. (3), (4) dan (5)



**MODUL PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Sekolah	: SMA Negeri 1 Marga
Mata Pelajaran	: Ekonomi
Kelas / Semester	: XI / Dua
Materi Pokok	: Perpajakan
Alokasi Waktu	: 8 x 45 menit (4 kali pertemuan)

Kompetensi Inti

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif; sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.

KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan **metakognitif** berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.7. Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi	<p>Pertemuan ke 1</p> <p>3.7.1. Menjelaskan pengertian pajak</p> <p>3.7.2. Mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak</p> <p>3.7.3. Menjelaskan hubungan antara pajak dengan APBN</p> <p>3.7.4. Menjelaskan perbedaan antara Pajak dengan pungutan resmi lainnya</p> <p>3.7.5. Menjelaskan asas pemungutan pajak</p> <p>3.7.6. Menjelaskan pengelompokan pajak</p> <p>Pertemuan ke 2</p> <p>3.7.7. Menjelaskan cara pemungutan pajak di Indonesia</p> <p>3.7.8. Mengidentifikasi macam-macam tarif pajak</p> <p>3.7.9. Menjelaskan alur pemungutan pajak di Indonesia</p> <p>3.7.10. Mengidentifikasi U perpajakan di Indonesia</p> <p>3.7.11. Menjelaskan UU nomor 28 tahun 2007 tentang</p>

	<p>Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan</p> <p>Pertemuan ke 3</p> <p>3.7.12. Mengidentifikasi objek PPh, PPN dan PBB</p> <p>3.7.13. Menghitung PPh dan PBB</p> <p>Pertemuan ke 4</p> <p>3.7.14. Menjelaskan tantangan pajak di Indonesia</p> <p>3.7.15. Mensimulasikan fungsi dan manfaat pajak</p> <p>3.7.16. Menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak</p>
4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi	4.7.2. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning*, peserta didik dapat menganalisis Perpajakan dalam pembangunan ekonomi, dan menyajikan hasil analisis fungsi dan peran Perpajakan dalam pembangunan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama.

Materi Pembelajaran

Perpajakan

8. Pengertian pajak
9. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak
10. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
11. Asas pemungutan pajak
12. Jenis-jenis pajak
13. Sistem pemungutan pajak di Indonesia
14. Objek dan cara pengenaan pajak

Pendekatan dan Metode Pembelajaran

- b. Pendekatan : *Saintifik*
- c. Model : *Problem-based blended learning*
- d. Metode : *Offline dan Online Learning (Cooperative and Independent Learning)*

Media Pembelajaran

Media/Alat : Laptop, LCD, Peta Konsep dan Power point, Google Classroom, WhatsApp Group

Sumber Belajar

- Buku Ekonomi untuk Kelas XI SMA Kurikulum 2013 (Tim MGMP Provinsi Bali)
- Ismawanto. 2017. Panduan Materi Sukses Olimpiade Sains Ekonomi Jilid 1 (Makro dan Mikro). Jakarta: Bina Prestasi Insani.
- Buku ekonomi lain yang relevan dan ber-isbn, internet dan nara sumber

Langkah-Langkah Pembelajaran

i. Pertemuan 1

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>Orientasi pada masalah</p> <p>e) Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih</p>	10 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<p>kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu.</p> <p>f) Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sumber penerimaan daerah dan belanja daerah, serta APBN dan APBD kemudian dihubungkan dengan pendapatan Negara dan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.</p> <p>g) Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini, yaitu; hubungan pajak dengan APBN dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru.</p> <p>h) Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait dengan perpajakan dan APBN.</p>	
Inti	<p>Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar</p> <p>c) Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok.</p> <p>d) Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang pengertian Pajak, Fungsi dan manfaat pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Hubungan antara pajak dengan APBN pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak dan pengelompokan pajak. <p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <p>d) Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan.</p> <p>e) Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>f) Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>.</p> <p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <p>d) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji.</p> <p>e) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>f) Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan.</p> <p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <p>e) Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas.</p> <p>f) Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas.</p>	70 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	g) Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i> . h) Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan.	
Penutup	Mengakhiri pembelajaran f) Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. g) Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. h) Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i> . i) Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp</i> grup secara fleksibel. j) Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali.	10 menit

j. Pertemuan II

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	Orientasi pada masalah a) Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu. b) Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait hubungan pajak dan APBN. c) Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini, yaitu; jenis pajak, system pemungutan pajak dan alur administrasi perpajakan di Indonesia dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru. d) Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait dengan jenis pajak, system pemungutan pajak dan alur administrasi perpajakan di Indonesia.	10 menit
Inti	Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar a) Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok. b) Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut: - Kelompok I, dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang cara pemungutan pajak dan tarif pajak melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang Alur perpajakan di Indonesia dan UU Perpajakan melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.	70 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<p>- Kelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU nomor 28 tahun 2007 tentang KUP melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan.</p> <p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>. <p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan. 	
	<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas. Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas. Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>. Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan. 	
Penutup	<p>Mengakhiri pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i>. Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp grup</i> secara fleksibel. Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali. 	10 menit

k. Pertemuan III

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	Orientasi pada masalah	10 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu. b) Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait hubungan pajak dan APBN. c) Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini, yaitu; PPh, PPN dan PBB dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru. d) Peserta didik disajikan beberapa permasalahan terkait PPh, PPN dan PBB. 	
Inti	<p>Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok. b) Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I, II dan III ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU PPh melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. - Kelompok IV, V, dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang perhitungan PPh dan PBB melalui buku-buku yang tersedia termasuk ke perpustakaan. <p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. b) Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>. c) Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>. <p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>. c) Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan. <p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas. b) Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas. c) Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>. d) Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi 	70 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan.	
Penutup	<p>Mengakhiri pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i>. Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp</i> grup secara fleksibel. Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali. 	10 menit

I. Pertemuan IV

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<p>Orientasi pada masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diajak untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dengan melaksanakan doa, absensi, serta mengecek kebersihan kelas dan persiapan belajar terlebih dahulu. Peserta didik diajak untuk mengingat dan menyinggung materi pada pertemuan sebelumnya terkait KUP dan PPh. Peserta didik diberikan apersepsi terkait dengan materi saat ini, yaitu; tantangan pajak di Indonesia dimana tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dipertegas oleh guru. Peserta didik disajikan beberapa permasalahan tentang tantangan pajak di Indonesia. 	10 menit
Inti	<p>Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik diminta untuk bekerja dalam grup dimana mereka dibagi menjadi enam kelompok. Peserta didik diminta untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah disajikan dimana tiap kelompok telah diberikan masalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok I dan II ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU PPN. - Kelompok III dan IV ditugaskan untuk melakukan kajian tentang UU PBB. - Kelompok V dan VI ditugaskan untuk melakukan kajian tentang perhitungan PBB dan tantangan pajak di Indonesia. 	70 menit
	<p>Membimbing penyelidikan kelompok maupun individu</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik didampingi oleh guru mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Peserta didik dapat mengakses sumber – sumber belajar yang disediakan di <i>Google Classroom</i>. Peserta didik diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam memecahkan masalah melalui <i>WhatsApp Group</i>. 	
	<p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p>	

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	<p>a) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan membuat laporan sesuai dengan masalah yang dikaji.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan laporan tersebut di <i>Google Classroom</i>.</p> <p>c) Peserta didik diminta untuk melaksanakan presentasi singkat di depan kelas terkait dengan permasalahan yang telah dipecahkan.</p> <p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <p>a) Peserta didik diberikan masukan dan evaluasi terkait dengan presentasi yang disampaikan di depan kelas.</p> <p>b) Peserta didik menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan presentasi kelompok lain secara langsung di dalam kelas.</p> <p>c) Peserta didik dapat menyampaikan komentar maupun pendapat terkait dengan laporan kelompok lain melalui <i>Google Classroom</i> ataupun <i>WhatsApp Group</i>.</p> <p>d) Peserta didik diminta untuk memperbaiki laporan sesuai masukan yang akan diberikan oleh guru di <i>Google Classroom</i> dan kembali mengumpulkan laporan hasil revisi di <i>Google Classroom</i> sesuai tenggat waktu yang diberikan.</p>	
Penutup	<p>a) Mengakhiri pembelajaran</p> <p>a) Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>b) Peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis singkat yang disediakan di <i>Google Classroom</i> dengan tenggat waktu yang telah disesuaikan dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun.</p> <p>c) Peserta didik juga disajikan ringkasan pembelajaran hari ini yang dapat diakses pada <i>Google Classroom</i>.</p> <p>d) Peserta didik dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum dimengerti di <i>WhatsApp</i> grup secara fleksibel.</p> <p>e) Peserta didik diminta untuk mengakhiri pembelajaran dengan doa dan mengecek kebersihan kelas kembali.</p>	10 menit

Y. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

13. Teknik Penilaian :

G. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis

H. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik dan Portofolio

14. Bentuk Penilaian :

A. Tes tertulis : Pilihan ganda dan Uraian beserta pedoman penilaian

B. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi dan pedoman penilaian

C. Portofolio : Pengumpulan tugas mandiri

15. Instrumen penilaian : terlampir

16. Alat Penilaian : Soal terlampir

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Marga

Marga, 15 Juli 2022
Guru Mata Pelajaran
Ekonomi

I Wayan Kantun Arimbawa,S.Ag.M.Pd.H
NIP. 196210091983011008

Siluh Made Surya Kartini,SE
NIP. 197704212010012014



Lampiran Materi Pembelajaran Materi Pertemuan I

PERPAJAKAN

1. Pengertian pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak :

- f. Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara
- g. Bersifat memaksa
- h. Berdasarkan Undang-undang
- i. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- j. Untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat

Dasar pemungutan pajak adalah UUD 1945 pasal 23A: “Pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

12. Fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN

a. Fungsi pajak

- 5) Fungsi budgeter, yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
- 6) Fungsi alokasi, yaitu pajak harus digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang
- 7) Fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan
- 8) Fungsi regulasi/stabilisasi, yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Manfaat pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri., membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.dengan demikian peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan **Wajib Pajak** dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal.

c. Pajak hubungannya dengan APBN

Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN, penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin

maupun pembiayaan pembangunan sangat tergantung kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak. Selain pajak pusat, juga terdapat Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pembangunan I, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan APBD. Hasil Pajak dialokasikan untuk :

1. Pembangunan infrastruktur, meliputi : Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi dan lainnya
2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat , meliputi : Layanan Pendidikan , Penanggulangan Kemiskinan , Layanan kesehatan, Ketahanan pangan dan Subsidi
3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha, meliputi : Ketahanan Negara, Keamanan dan Ketertiban

13. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya

Selain pajak, penerimaan pemerintah lainnya (bea ekspor dan impor, retribusi, bea meterai, sumbangan wajib, cukai, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan negara atau daerah.

Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya, sebagai berikut:

Dilihat Dari	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
Imbalan jasa (kompensasi)	Tidak diterima secara langsung	Diterima secara langsung
Dasar pemungutan	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dsb.
Cara perhitungan	Sendiri oleh wajib pajak	Oleh aparaturnegara
Jatuh tempo	Sesuai dengan tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian
Sanksi	Sesuai yang tercantum dalam UU	Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
Surat ketetapan pajak (kohir)	Ada	Tidak ada
Sifat pungutan	Memaksa	Sesuai kebijakan pemerintah

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN I

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Ciri-ciri apa saja yang terdapat pengertian Pajak ?
2. Identifikasikan fungsi pajak!
3. Identifikasikan peranan pajak yang dipungut oleh pemerintah !
4. Jelaskan pengertian istilah di bawah ini :
 - c. Retribusi
 - c. Bea Masuk
 - e. Sumbangan
 - d. Cukai
 - d. Bea Keluar
5. Jelaskan perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya !

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

Lakukanlah diskusi tentang permasalahan berikut dengan rekan kelompokmu!

1. Carilah informasi mengenai besarnya Pajak perdagangan selama 5 tahun terakhir dan penjabarannya, sekaligus cara meningkatkan penerimaan pajaknya!
2. Informasi bisa diperoleh melalui media massa maupun internet.
3. Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!



Materi Pertemuan 2

Asas pemungutan pajak

Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- a. **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. **Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. **Asas Convenience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. **Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Jenis-jenis pajak atau Penggolongan Pajak

a. Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (PPn.BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - c. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
 - d. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Golongannya atau Siapa yang Memungut Pajak

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia

2. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

4. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang ber-sangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sedangkan tarif pajak terdiri atas :

5. Tarif pajak proporsional (sebanding) Yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
6. Tarif pajak degresif (menurun) Yaitu tarif pajak dengan menggunakan presentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak.
7. Tarif pajak konstan (tetap) Yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
8. Tarif pajak progresif (menaik) Yaitu tarif pajak dengan persentase yang semakin menaik/meningkat untuk dasar setiap pengenaan pajak

Alur administrasi perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Perpajakan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk memudahkan dalam memahami kewajiban maupun hak wajib pajak, maka diperlukan pemahaman ketentuan formal maupun material perpajakan. Ketentuan normal diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sementara ketentuan material diatur dalam UU PPh maupun UU PPN/PPn BM. Sehingga secara administratif kewajiban maupun hak wajib pajak antara lain :

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Menghitung besarnya pajak terutang
- c. Memotong atau memungut pajak pihak lain
- d. Melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong/dipungut
- e. Melaporkan pajak yang terutang
- f. Menyelenggarakan pembukuan
- g. Kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pajak
- h. Meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak
- i. Pengajuan pembetulan ketetapan pajak
- j. Mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak
- k. Mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif
- l. Pengajuan pembatalan ketetapan pajak
- m. Mengajukan penghapusan NPWP

Undang-undang antara lain mengatur tata cara pendaftaran, tata cara penghapusan, tata cara pembayaran, dan tata cara keberatan. UU PPh dan UU PPN/PPn BM antara lain mengatur penghitungan, pemotongan dan pemungutan pajak dan besarnya tarif pajak.

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 2

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Jelaskan perbedaan tarif pajak progresif, proporsional, regresif, regresif dan konstan !
2. Identifikasikan Menurut Lembaga Pemungutnya atau Cara Pemungutannya!
3. Berikan contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung!
4. Dari tiga macam sistem pemungutan pajak yang ada, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang mana? Jelaskan!
5. Bagaimana alur administrasi perpajakan di Indonesia?

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

Tugas Mandiri :

Carilah data melalui internet tentang Pajak apa saja yang tergolong menggunakan system pemungutan pajak berdasarkan pajak progresif, proporsional, regresif, regresif dan tarif pajak konstan! Dan Kumpulkanlah hasil pekerjaan kepada guru untuk memperoleh apresiasi!

Materi Pertemuan 3

Objek dan cara pengenaan pajak

Subjek pajak adalah pihak – pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak yaitu sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak.

Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya.

f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang ini berisi dua bab, yaitu :

3. Bab I Tentang Pengertian dasar yang berkaitan dengan Pajak dan Perhitungan pajak.
4. Bab II Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak.

g. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan **PKP (Penghasilan Kena Pajak)** dan **PKP = Penghasilan persih pertahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 36 tahun 2008, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu:

- Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Tarif Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, Tarif Pajak yang ditetapkan atas penghasilan sebagai berikut :

- wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (limapuluhjuta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Contoh 1 :

Penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi, Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000,00. Maka Pajak Penghasilan yang terutang:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 &= \text{Rp } 30.000.000,00 \\
 25\% \times \text{Rp } 250.000.000,00 &= \text{Rp } 62.500.000,00 \\
 30\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 &= \underline{\text{Rp } 30.000.000,00 (+)} \\
 &= \text{Rp } 125.000.000,00
 \end{aligned}$$

Contoh 2 :

Pak Chandra sebagai karyawan Primagama, penghasilan neto setiap bulannya Rp 10.000.000,00. Pak Chandra sudah beristeri tidak bekerja dan mempunyai 4 anak.

Berapakah pajak terutang setiap bulannya ?

Jawab:

Penghasilan neto 12 bulan x Rp 10.000.000,00 = Rp 120.000.000,00

PTKP - wajib pajak Rp 24.300.000,00

- isteri Rp 2.025.000,00

- anak (maks 3)

3 x Rp 2.025.000,00 Rp 6.075.000,00 +

= Rp 32.400.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 87.600.000,00

=

Jadi, PPh terutang

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 37.600.000,00 = Rp 5.640.000,00 +

= Rp 8.140.000,00 per tahun

=====

Pajak penghasilan perbulan = Rp 8.140.000,00 : 12 = Rp 678.333,33

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah : 28% (dua puluh delapan persen) pada tahun 2009 dan 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00 pada tahun 2012

Maka Pajak Penghasilan yang terutang: 25% x Rp1.250.000.000,00 = Rp312.500.000,00

INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 3

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Hal-hal apa saja yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti yang terdapat dalam UU nomor 28 tahun 2007?
2. Wajib Pajak A mempunyai istri dan 4 orang anak. Hitunglah besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberikan oleh Wajib Pajak A tersebut. Jika istrinya mempunyai penghasilan yang digabung dengan suaminya, maka hitunglah besarnya PTKP wajib pajak tersebut !
3. Seorang wajib pajak mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 75.000.000,00. Hitunglah besarnya Pajak Penghasilan !
Dan jika besarnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 45.000.000,00 hitunglah besarnya pajak terutang !
4. Tuan Darmono mempunyai istri dan 3 orang anak. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk jangka waktu bulan tersebut !
5. Tuan Frida seorang pegawai perusahaan dengan gaji per bulan Rp. 4.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp. 150.000,00 per bulan, membayar iuran jaminan sosial Rp. 200.000,00 per bulan serta membayar iuran THT Rp. 50.000,00 per bulan. Tuan Frida belum menikah. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotongkan setiap bulannya dan buatlah jurnalnya !

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS KELOMPOK

4. Carilah data melalui internet tentang Besarnya PPh Indonesia selama 5 tahun terakhir!
5. Carilah pula data melalui internet tentang besarnya PPh salah satu Negara di luar negeri selama 5 tahun terakhir
6. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara meningkatkan PPh tersebut!
7. Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!



Materi Pertemuan 4

h. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tarif PPN dan PPn BM

Menurut Pasal 7 UU nomor 42 tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

- (4) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - e. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - g. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (6) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), menurut Pasal 8, adalah:

- (5) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen).
- (6) Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (7) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (8) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Mulai tanggal 1 Januari 2014 PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah. Untuk PBB Perkebunan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan menurut nilai jualnya

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

- e. objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (masjid, gereja, wihara, rumah sakit, pesantren/madrasah, panti asuhan, museum, candi)
- f. objek pajak yang digunakan kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah desa
- g. objek pajak untuk perwakilan diplomatik, konsulat
- h. objek pajak yang digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional (PBB, ASEAN, dan lain-lain)

Tarif PBB

Tarif PBB yang dikenakan pada obyek pajak adalah 0,5% dari nilai jual obyek kena pajak. Dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 6.000.000,00 dan paling tinggi Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Dasar pengenaan PBB antara lain :

6. Dasarnya adalah nilai jual obyek pajak.
 7. Besarnya nilai jual obyek pajak ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
 8. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 9. Besarnya Nilai jual kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
 10. Objek PBB yang NJOP lebih dari Rp 1 milyar, Dasar perhitungannya 40%
- j. Peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Meterai**
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, besarnya bea meterai sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat lamaran sebesar Rp 6.000,00
 - b. Dokumen nominal Rp 250.000,00 – Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 3.000,00
Lebih dari Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 6.000,00
 - c. Cek dan bilyet giro sebesar Rp 3.000,00

14. Tantangan pemungutan pajak

Peran vital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi yang diamanahi tugas penghimpun penerimaan negara harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan, artinya belum sebanding antara besarnya jumlah penduduk dengan Wajib Pajak yang masih rendah. Padahal penerimaan pajak banyak dialokasikan untuk fasilitas umum yang banyak dinikmati oleh seluruh jumlah penduduk.

Terkadang, masyarakat banyak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Dan ada banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan diatas Panghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 24,3 Juta/ Tahun yang dapat menjadi target sosialisasi. Menilik kepada situasi ini, sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus kian gencar dijalankan hingga ke jajaran yang terdekat dengan masyarakat serta dengan melibatkan unsur pemerintahan lokal sebagai pendukung. Sosialisasi secara umum dapat dibedakan menjadi sosialisasi langsung kepada sasaran dan ada juga dengan cara yang koersif positif. Cara yang kedua ini adalah dengan menjadikan NPWP sebagai unsur pokok setiap

pemenuhan kewajiban administratif publik yang dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat akan tergerak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP. Khususnya mereka yang berpenghasilan bersih di atas PTKP.

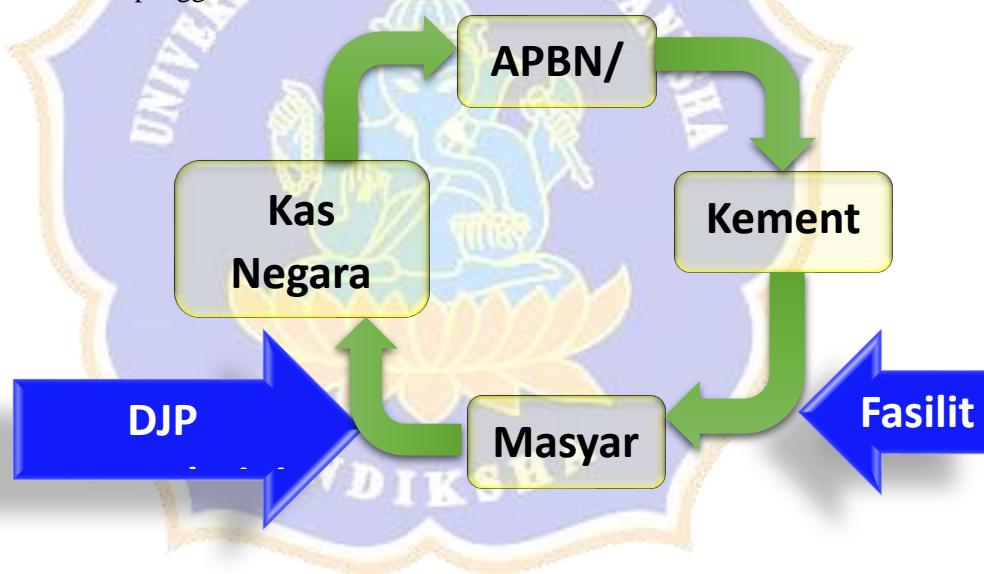
15. Simulasi fungsi dan manfaat pajak

Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pajak mengajak peran serta **rakyat Indonesia** untuk membiayai negaranya sendiri, untuk itulah pajak memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting dalam pembangunan negara.

Terdapat aspek-aspek yang terkait dengan Perpajakan :

- f. Aspek Ekonomi, artinya penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dengan melakukan pembangunan.
- g. Aspek Sosial, artinya pemerataan pembangunan dan keadilan dalam membayar pajak.
- h. Aspek Politik, artinya secara politis masyarakat/pembayar pajak mempunyai posisi yang semakin baik dalam melakukan "tawar menawar" dengan pemerintah.
- i. Aspek Hukum, artinya Sebagai negara hukum semua pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan hukum.
- j. Aspek Agama, artinya Tuhan memerintahkan bahwa manusia, selain harus beribadat yaitu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan juga harus dapat berhubungan baik dengan sesamanya, saling berkomunikasi, bersilaturahmi dan saling membantu.

Untuk lebih menjelaskan fungsi dan manfaat pajak, berikut disajikan gambar alur penerimaan dan penggunaan dana APBN/APBD



INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 4

Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!

1. Jelaskan pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)!
2. Bagaimana tarif Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah?
3. Sumadi mengimpor barang mewah dengan PPn BM 35 %. Jika harga barang senilai Rp. 400.000.000,00 maka jumlah yang dibayar oleh Sumadi sebesar berapa ?
4. Pada tahun 2013 Tuan Bagus memiliki sebidang tanah 1000 m² dengan NJOP Rp. 300.000,00/m², dan bangunan seluas 400 m² dengan NJOP Rp. 350.000,00/m². Taman

mewa 200 m² dengan NJOP Rp. 50.000,00/m² dan pagar mewa 240 m² dengan NJOP Rp. 175.000,00/m². Hitunglah besarnya PBB yang terutang tahun 2013 !

5. Tantangan apa saja dalam pemungutan pajak di Indonesia

Score : Setiap soal memiliki nilai 5

Nilai akhir : Jumlah Score x 4

TUGAS DISKUSI PESERTA DIDIK

1. Carilah data melalui internet tentang PBB yang diperoleh salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia selama 5 tahun terakhir!
2. Berikan penjelasan seperlunya data PBB tersebut!
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota tersebut dalam meningkatkan penerimaan PBBnya?
4. Diskusikan dengan kelompokmu
5. Buatlah laporan hasil diskusi untuk disampaikan kepada Gurumu!



PENILAIAN LAPORAN**Penilaian kompetensi ketrampilan : Penilaian Proyek**

KD	IPK
4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi	4.7.2. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak

Satuan pendidikan : SMA NEGERI 1 Marga
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Kelas/Semester : XI/2
 Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik/Kelompok	Skor Perolehan					Jml
		Kerjasama kelompok	Kecepatan pengerjaan	Ketepatan pengerjaan	Tehnik presentasi	Laporan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai akhir ketrampilan :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{5}$$

Penilaian kompetensi ketrampilan : Portofolio

KD	IPK
4.7. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi	4.7.2. Mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak

Satuan pendidikan : SMA NEGERI 1 Marga
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Kelas/Semester : XI/2
 Mata Pelajaran : Ekonomi

No	Nama Peserta didik	SKOR			Nilai Akhir
		Ketepatan waktu	Kerapihan	Kebenaran Jawaban	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Perolehan Score}}{3}$$

SOAL ULANGAN HARIAN

1. Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah Pusat Indonesia adalah dari:
 - F. cukai
 - G. bea masuk
 - H. pajak penghasilan
 - I. pajak pertambahan nilai
 - J. pajak bumi dan bangunan

2. Dampak langsung pengenaan pajak atas suatu barang ialah....
 - A. kenaikan harga barang yang bersangkutan
 - B. meningkatnya laju inflasi
 - C. berkurangnya produksi atau pasokan (*supply*) barang tersebut
 - D. berkurangnya penjualan (permintaan terhadap) barang tersebut
 - E. meningkatnya penerimaan atau pendapatan pemerintah

3. Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek tertentu dinamakan
 - A. *Public Assessment System*
 - B. *Self Assessment System*
 - C. *Official Assessment System*
 - D. *Corporate Assessment System*
 - E. *With holding System*

4. Menurut Adam Smith, prinsip dalam pemungutan pajak (yang sering disebut sebagai “*The Four Maxims*”) adalah berikut ini, kecuali
 - A. Prinsip kesamaan/keadilan (*equation*)
 - B. Prinsip kepastian (*certainly*)
 - C. Prinsip redistribusi pendapatan (*redistribution of income*)
 - D. Prinsip ketepatan waktu (*convenience of payment*)
 - E. Prinsip ekonomis (*economics of collection*)

5. Pemerintah Daerah Sumatra Selatan berencana memberikan porsi pembagian pajak yang lebih besar pada tahun anggaran 2015 untuk pemerataan pembangunan bagi daerah tertinggal dan daerah miskin. Dalam hal ini berarti pajak melakukan fungsi
 - A. Alokasi
 - B. Distribusi
 - C. Mengatur
 - D. Stabilitas
 - E. Pembiayaan

6. Dalam rangka meningkatkan produksi perfilm nasional dan juga rasa cinta terhadap produksi dalam negeri, pemerintah berencana akan menaikkan pajak impor terhadap film asing dan juga barang-barang impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini berarti pajak tersebut mempunyai fungsi
 - A. Distribusi
 - B. Moneter
 - C. Budgeter
 - D. Keadilan
 - E. Regulasi

7. Tarif pajaknya tetap, tetapi semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, maka system pajak tersebut adalah
- Progresif
 - Proporsional
 - Tarif tetap
 - Degresif
 - Regresif
8. Pada system pajak penghasilan progresif, penghasilan seseorang yang semakin tinggi dikenakan
- Jumlah pajak yang semakin besar
 - Jumlah pajak yang semakin kecil
 - Tarif pajak yang semakin besar
 - Tarif pajak yang semakin kecil
 - Pajak yang adil
9. Dari segi pemungutannya Pajak Penjualan (PPn) tergolong sebagai pajak yang bersifat...
- progresif
 - sukarela
 - paksaan
 - langsung
 - tak langsung

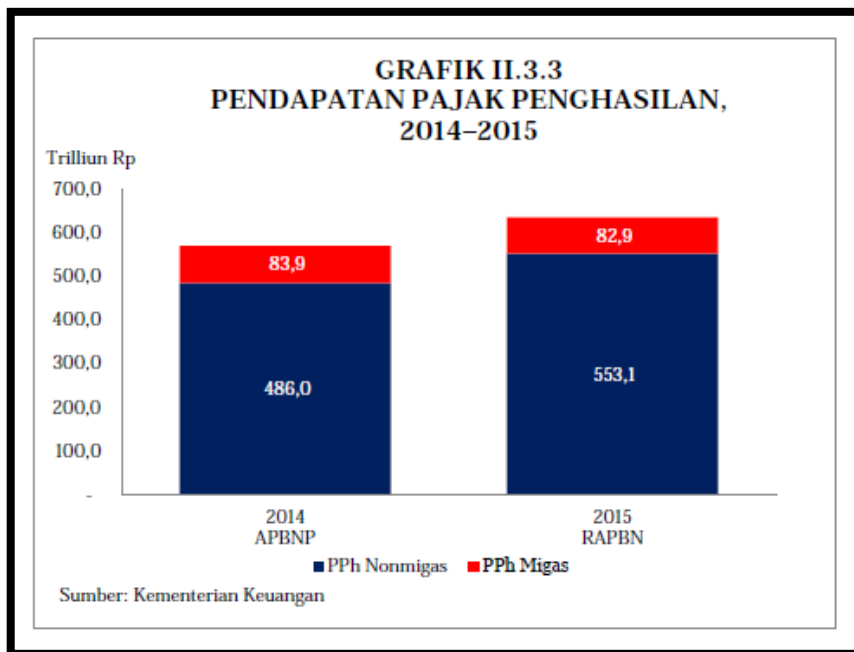
10. Tabel di bawah ini hasil perhitungan pajak dar berbagai tarif pajak :

Penghasilan	Besar pajak yang dibayarkan				
	Tarif I	Tarif II	Tarif III	Tarif IV	Tarif V
Rp 20.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Rp 30.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 5.400.000,00
Rp 40.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 6.400.000,00

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa

- Tarif I konstan dengan persentase pajaknya meningkat
 - Tarif II proporsional dengan persentase pajak meningkat
 - Tarif III progresif dengan persentase pajaknya meningkat
 - Tarif IV degresif dengan hasil perhitungan pajaknya meningkat
 - Tarif V regresif dengan persentase pajaknya meningkat
11. UU No. 36 Tahun 2008 menentukan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan, yaitu 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010. Untuk Wajib Pajak Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Pada tahun 2009 PT Makin Jaya (belum go public) memperoleh penghasilan bersih selama setahun sebesar Rp405.500.000,00. Dengan demikian, pajak penghasilan terutang dari PT Makin Jaya adalah....
- Rp81.100.000,00
 - Rp93.265.000,00
 - Rp101.375.000,00
 - Rp104.150.000,00
 - Rp113.540.000,00

12. Grafik berikut ini merupakan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia :



Analisis pendapatan negara dari pajak penghasilan yang benar adalah

A. Persentase PPh Migas tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2015

11. Persentase PPh Nonmigas tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2015

12. Kenaikan PPh Migas tahun 2015 lebih besar dari pada kenaikan PPh Nonmigas

13. Kenaikan PPh Migas tahun 2015 lebih kecil dari pada kenaikan PPh Nonmigas

14. Kenaikan PPh Nonmigas lebih besar dari pada penurunan PPh Migas

13. Ibu Ida memiliki sebidang tanah dengan panjang 25 meter dan lebar 10 meter. Di atas tanah tersebut didirikan bangunan dengan panjang 10 meter dan lebar 7 meter. Di daerah tersebut harga tanah per meter persegi Rp2.000.000,00 dan bangunan Rp2.100.000,00. Apabila tarif PBB 0,2% dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp12.000.000,00, maka pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Ibu Ida adalah

A. Rp 1.270.000,00

B. Rp 1.000.000,00

C. Rp 706.000,00

D. Rp 270.000,00

E. Rp 127.000,00

14. Bapak Abdul hakim menempati rumahnya sendiri dengan luas tanah 200 m² dengan nilai jual per m² adalah Rp 400.000,00, luas bangunan 100m² dengan nilai jual per m² adalah Rp 600.000,00, pagar sepanjang 10 m dengan tinggi 1,5 m nilai jual per m² Rp 200.000,00, nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp 12.000.000,00, bila tarif pajaknya 0,1% maka PBB-P2 terutang bapak Abdul hakim adalah

A. Rp 60.500,00

B. Rp 118.000,00

C. Rp 131.000,00

D. Rp 133.000,00

E. Rp 145.000,00

15. Pak Sidarta seorang karyawan dari suatu perusahaan memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) per bulan Rp 8.750.000,00

Tabel penghasilan dan tarif pajak

Penghasilan	Tarif
s.d. Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pak Sidarta dalam satu tahun adalah ...

- A. Rp 2.500.000,00
- B. Rp 8.250.000,00
- C. Rp 10.500.000,00
- D. Rp 10.750.000,00
- E. Rp 15.750.000,00

16. Pak Suherman memperoleh penghasilan kena pajak dalam sebulan sebesar Rp50.000.000,00. Tabel tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PKP	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Rp500.000.000,00 ke atas	30%

Besar pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Suherman adalah ...

- A. Rp2.500.000,00
- B. Rp30.000.000,00
- C. Rp62.500.000,00
- D. Rp125.000.000,00
- E. Rp180.000.000,00

17. Seorang wajib pajak memiliki:

- Tanah seluas 2.000 m² dengan harga jual Rp300.000/m².
- Bangunan seluas 1.500 m² dengan harga jual Rp500.000/m².
- Pagar sepanjang 200 tinggi 2 m dengan harga jual Rp100.000/m².

Jika nilai bangunan tidak kena pajak sebesar Rp12.000.000,00, jika tarif PBB-P2 sebesar 0,1% maka besarnya PBB-P2 yang harus dibayar sebesar

- A. Rp 2.756.000,00
- B. Rp 1.390.000,00
- C. Rp 1.378.000,00
- D. Rp 1.338.000,00
- E. Rp 689.000,00

18. Berikut ini tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan kena pajak

- A. Di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak
- B. di atas Rp50 juta s.d Rp200 juta: 10 %
- C. di atas Rp50 juta s.d Rp250 juta: 10%
- D. di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta: 20%
- E. di atas Rp500 juta : 30%

19. Bu Vero seorang wirausaha yang bergerak dalam usaha boga/catering. Ia mempunyai tanah seluas 300 m² dengan nilai jual Rp 500.000/m². Bangunan rumah seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 700.000/m². Taman mewah 100 m² dengan nilai jual Rp 200.000/m² dan pagar mewah panjang 100 m dengan tinggi 1,5 m dengan nilai jual Rp 200.000/m². Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 10.000.000,00. Besarnya Pajak Bumi dan bangunan yang terutang Bu Vero jika tariff PBB-P2 0,1% adalah
- Rp 314.000,00
 - Rp 322.000,00
 - Rp 330.000,00
 - Rp 628.000,00
 - Rp 644.000,00
20. Biaya pemberlakuan pajak oleh pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat termasuk biaya-biaya berikut ini, kecuali:
- Biaya pajak yang dibayarkan pada pemerintah oleh masyarakat
 - Biaya administrasi yang timbul terkait dengan pajak
 - Biaya pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat
 - Hilangnya surplus konsumen karena pajak
 - Hilangnya surplus produsen karena pajak
21. Hal berikut ini merupakan ciri pajak yang dapat dibedakan dengan ciri pungutan resmi lainnya, yakni
- bersifat memaksa
 - dipungut oleh pemerintah daerah saja
 - jatuh temponya disesuaikan dengan pemakaian
 - didasarkan pada Peraturan Pemerintah
 - balas jasa diterima secara langsung oleh pembayar pajak
22. Di antara ketentuan atau kebijakan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal ialah....
- kenaikan tarif bagi kendaraan yang melintasi jalan tol
 - pemberian kelonggaran pajak (*tax holiday*) bagi perusahaan baru
 - kenaikan atau penurunan *BI rate* (sukubunga SBI satu bulan)
 - perubahan giro wajib minimum (GWM) bagi bank-bank
 - keharusan BUMN untuk menyetorkan sebagian labanya ke kas negara
23. Bapak Suprpto mempunyai dan menempati sebuah rumah mewah di jalan Adyaksa dengan luas Tanah 600 m², luas bangunan 250 m², taman mewah 50 m² dan pagar mewah dengan panjang 20 m tinggi 1,5 m. Menurut data PBB nilai jual obyek pajak tanah Rp 800.000,00 permeter, bangunan Rp 600.000,00 permeter, taman mewah Rp 400.000,00 permeter dan pagar mewah Rp 200.000,00 permeter. Jika bangunan tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00, maka besarnya PBB Bapak Suprpto apabila tarif PBB-P2 sebesar 0,1% dalah
- | | |
|------------------|--------------------|
| A.Rp 642.000,00 | D. Rp 6.440.000,00 |
| B. Rp 644.000,00 | E. Rp 6.560.000,00 |
| C.Rp 656.000,00 | |

24. Perhatikan jenis pajak berikut!

- (6) Pajak pertambahan nilai
- (7) Pajak penghasilan
- (8) Pajak bumi dan bangunan
- (9) Pajak perseroan
- (10) Pajak penjualan

Berdasarkan jenis pajak di atas, yang termasuk pajak langsung ditunjukkan oleh nomor....

- A.(1), (2), dan (3)
- B.(1), (3), dan (5)
- C.(2), (3), dan (4)
- D.(2), (4), dan (5)
- E.(3), (4), dan (5)

25. Tuan Bagaskoro warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan bersumber dari Indonesia, tiap tahun aktif membayar pajak kepada pemerintah. Tuan Bagaskoro dalam membayar pajak dan pelaporan pajak penghasilannya dipercayakan kepada pihak ketiga hal tersebut merupakan system pemugutan pajak....

- A.Official assesmen system
- B.Withholding system
- C.Multimatic system
- D.Economic official system
- E.Rental official sistem



Lampiran 7. Data dan Hasil Uji Kesetaraan

F. Data Uji Kesetaraan

No.	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Kel. 4	Kel. 5	Kel. 6	Kel. 7
1	85	82	84	84	73	73	73
2	85	82	77	80	73	73	73
3	85	83	84	81	80	79	79
4	84	83	85	83	73	82	82
5	85	83	85	81	80	79	79
6	85	85	85	80	84	82	82
7	83	83	84	83	82	84	84
8	85	84	82	80	81	80	80
9	86	76	85	84	81	82	82
10	85	84	85	81	83	75	75
11	85	84	85	82	83	83	83
12	84	84	85	82	84	79	79
13	85	84	84	81	79	79	79
14	85	84	82	83	75	74	74
15	85	84	84	81	80	82	82
16	85	84	85	80	84	79	79
17	85	84	85	81	73	80	80
18	84	84	84	81	82	79	79
19	85	84	84	81	80	82	82
20	84	84	84	80	83	73	73
21	85	84	84	80	83	83	83
22	82	82	85	82	81	79	79
23	85	84	85	81	81	83	83
24	82	84	82	80	75	79	79
25	85	81	85	81	84	83	83
26	83	84	84	81	80	79	79
27	84	84	76	80	75	79	79
28	84	80	85	82	80	83	83
29	82	84	85	82	85	80	80
30	86	83	83	81	85	78	78
31	82	81	84	81	82	79	79
32				81	82	70	72
33				81	82	74	
34				80	79	74	
35					73	78	
36						85	

G. Hasil Uji Kesetaraan

ANOVA					
Nilai					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	293.088	6	48.848	2.004	.056
Within Groups	2166.930	222	9.761		
Total	2460.017	228			



Lampiran 8. Instrumen Penelitian

DEFINISI KONSEPTUAL

a. Kemampuan Berpikir Kritis

Ariani (2020) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan proses berpikir kearah yang lebih dalam dan detail dimana peserta didik dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta mengajukan gagasan atau ide – ide terbaru.

b. Kemampuan Berpikir Kreatif

Coon and Mitterer (2014) berpendapat bahwa berpikir kreatif adalah aktivitas memecahkan masalah melalui proses eksperiensial secara tidak sadar di dalamnya tercakup kelancaran dalam menghasilkan sejumlah ide, keluwesan, menggunakan waktu dalam menghasilkan beragam jenis solusi, dan kebaruan ide atau solusi yang dihasilkan.

DEFINISI OPERASIONAL

1. Kemampuan berpikir kritis merupakan proses berpikir kearah yang lebih dalam dan detail dimana peserta didik dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta mengajukan gagasan atau ide terbaru terkait dengan materi APBN dan APBD dalam sistem perpajakan.
2. Kemampuan berpikir kreatif adalah aktivitas memecahkan masalah melalui proses eksperiensial secara tidak sadar di dalamnya tercakup kelancaran dalam menghasilkan sejumlah ide, keluwesan, menggunakan waktu dalam menghasilkan beragam jenis solusi, dan kebaruan ide atau solusi yang dihasilkan terkait dengan materi APBN dan APBD dalam sistem perpajakan.

INSTRUMEN PENILAIAN BERPIKIR KRITIS

Teori

Komalasari (2011: 266) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis dapat ditinjau dari beberapa indikator, yaitu; 1) menyampaikan penjelasan sederhana (*elementary clarification*), 2) membangun keterampilan dasar (*basic support*), 3) membuat inferensi (*inferring*), 4) membuat penjelasan lebih lanjut (*advanced clarification*), 5) mengatur strategi dan taktik (*strategies and tactics*).



KISI – KISI INSTRUMEN PENILAIAN BERPIKIR KRITIS

Kompetensi Dasar	Topik Pembelajaran	Indikator Berpikir Kritis	Indikator Penilaian	Dimensi	Butir Soal
3.6. Menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi.	APBN dan APBD	Menyampaikan penjelasan sederhana (<i>elementary clarification</i>)	Peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis terkait dengan tujuan APBN dan APBD dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penjelasan sederhana.	C4	1
		Membangun keterampilan dasar (<i>basic support</i>)	Peserta didik mampu merangkum dasar tentang mekanisme penyusunan APBN dan APBD.	C5	2
		Membuat inferensi (<i>inffering</i>)	Peserta didik mampu menyimpulkan fungsi APBN dan APBD berdasarkan pernyataan yang diberikan.	C5	3
		Membuat penjelasan lebih lanjut (<i>advanced clarification</i>).	Peserta didik mampu menangani surplus yang dialami oleh APBD.	C5	4
		Mengatur strategi dan taktik (<i>strategies and tactics</i>).	Peserta didik mampu menyusun strategi dan taktik sebagai Tindakan yang dapat dilakukan penerimaan APBN dari pajak dapat tercapai.	C6	5
3.8. Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi.	Perpajakan	Menyampaikan penjelasan sederhana (<i>elementary clarification</i>)	Peserta didik mampu menjelaskan penghasilan yang teridentifikasi sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak.	C4	6
		Membangun keterampilan dasar (<i>basic support</i>)	Peserta didik mampu memberikan rekomendasi terkait aplikasi konsep <i>equity</i> dalam perpajakan di	C5	7

			Indonesia.		
		Membuat inferensi (<i>inffering</i>)	Peserta didik mampu menyimpulkan kewajiban seorang wajib pajak.	C5	8
		Membuat penjelasan lebih lanjut (<i>advanced clarification</i>).	Peserta didik mampu memberikan penjelasan terkait dengan pajak penghasilan dan iyuran pensiun.	C5	9
		Mengatur strategi dan taktik (<i>strategies and tactics</i>).	Peserta didik mampu menyampaikan hasil perhitungan perhitungan PBB dengan tarif pusat dan tarif daerah.	C5	10



Soal Tes Berpikir Kritis

1. APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal melaksanakan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Melalui adanya APBD akan dapat mencegah penyelewengan, pemborosan dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah. Dari pernyataan tersebut, berikan penjelasan singkat terkait dengan tujuan dari APBD berdasarkan hasil analisismu!
2. Rangkumlah mekanisme penyusunan APBN dan APBD!
3. Peran penerimaan pajak dalam mengisi kas APBN dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis. Besarnya peranan pajak yang demikian kiranya perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat menjadi satu kebanggaan tersendiri karena telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Buatlah kesimpulan terkait dengan fungsi APBN berdasarkan pernyataan di atas!
4. Surplus adalah jumlah aset atau sumber daya yang melebihi porsi yang digunakan secara aktif akan tetapi Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Coba jelaskan apa tindak lanjut yang akan dilakukan apabila APBD mengalami surplus!
5. Susunlah taktik dan strategi yang dapat digunakan sebagai tindakan yang harus dilakukan agar penerimaan APBN dari pajak dapat tercapai?
6. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak, baik yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak. Identifikasi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan jelaskan mengapa penghasilan tersebut digolongkan sebagai non objek pajak!
7. *Equity* merupakan salah satu konsep terkait sistem perpajakan agar sebuah negara memiliki sistem perpajakan yang mampu berjalan dengan baik. Buatlah rekomendasi aplikasi konsep equity dalam sistem perpajakan di Indonesia!
8. Wajib pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana mereka mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Simpulkan kewajiban seorang wajib pajak!
9. Tuan Anto mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,00 . Tuan Anto mempunyai seorang istri dan tiga orang anak.

Berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Anto jika Tuan Anto juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00?

10. Diketahui Pak Halim memiliki rumah dengan:

- Luas tanah 1.000 m² dengan nilai jual Rp. 802.000,00 per meter persegi.
- Luas rumah 850 m² dengan nilai jual Rp. 968.000,00 per meter persegi.
- NJOP tidak kena pajak Rp. 12.000.000,00

Hitunglah PBB yang dibayar Pak Halim jika menggunakan tariff pusat dan tariff daerah!

INSTRUMENT KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF

Teori

Haryanti and Saputra (2019) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif diukur menggunakan tes keterampilan berpikir kreatif yang sesuai dengan aspek keterampilan berpikir kreatif yang termuat dalam *Torrance Tests of Creative Thinking* (TTCT) yang terdistribusi ke dalam dimensi-dimensi yakni kelancaran (*fluency*), keaslian (*originality*), keluwesan (*flexibility*), dan pengembangan (*elaboration*). Keempat dimensi ini diadaptasi dalam rubrik penilaian kinerja peserta didik.

KISI – KISI INSTRUMENT BERPIKIR KREATIF

No.	Domain Kerja	Indikator Berpikir Kreatif				Jumlah
		Kelancaran	Keaslian	Keluwesannya	Pengembangan	
6.	Penyusunan proyek					
7.	Perencanaan					
8.	Penyajian					
9.	Presentasi					
10.	Produk					
Total skor						

Rentangan skor pada masing – masing indikator

- 1 = Sangat buruk
- 2 = Buruk
- 3 = Cukup
- 4 = Baik
- 5 = Sangat baik

INSTRUMENT PENILAIAN BERPIKIR KREATIF

No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	Skor				
				1	2	3	4	5
4.	Penyusunan projek	Kelancaran	Peserta didik mampu menyusun projek terkait dengan pemaparan APBD dan APBN secara sistematis tanpa hambatan.					
		Keaslian	Peserta didik menyusun projek terkait dengan pemaparan APBD dan APBN yang tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi cara menyusun, bahasa, maupun isi.					
		Keluwesan	Peserta didik menyusun projek terkait dengan APBD dan APBN secara luwes ditinjau dari kerangka susunan proje, bahasa, maupun isi.					
		Pengembangan	Peserta didik menyusun projek dengan cara mengelaborasi informasi awal yang mereka kumpulkan terkait dengan APBD dan APBN ditinjau dari isi kerangka yang disusun.					
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	1	2	3	4	5
5.	Perencanaan	Kelancaran	Perencanaan peserta didik terkait dengan APBN dan APBD dikerjakan dengan lancar tanpa hambatan.					
		Keaslian	Perencanaan yang dibuat oleh peserta didik terkait dengan APBN dan APBD tidak pernah dilakukan oleh orang lain ditinjau dari segi isi maupun bahasa.					
		Keluwesan	Perencanaan yang dilakukan secara luwes oleh peserta					

			didik dimana isi dan bahasa yang digunakan mudah dipahami.					
		Pengembangan	Perencanaan yang dibuat peserta didik dielaborasi dengan informasi yang telah digali terkait dengan materi APBN dan APBD.					
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	1	2	3	4	5
6.	Penyajian	Kelancaran	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan dengan lancar tanpa ada hambatan.					
		Keaslian	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan dengan cara penyajian yang relevan dan berbeda dengan yang orang lain lakukan ditinjau dari isi dan bahasa.					
		Keluwesannya	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan secara luwes oleh peserta didik dari segi isi maupun bahasa sehingga mudah dipahami.					
		Pengembangan	Data perhitungan APBN dan APBD disajikan berdasarkan informasi yang telah dielaborasi oleh peserta didik sesuai dengan kaidah perhitungan dan sistem perpajakan yang berlaku.					
	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	1	2	3	4	5
	Presentasi	Kelancaran	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan lancar dan menguasai proyek dengan baik tanpa ada hambatan.					
		Keaslian	Peserta didik					

			mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan cara yang tidak dilakukan dari orang lain ditinjau dari segi isi dan bahasa.					
		Keluwesan	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD secara luwes sehingga mudah dipahami.					
		Pengembangan	Peserta didik mempresentasikan proyek terkait dengan perhitungan APBN dan APBD dengan mengelaborasi informasi dan sistematika perhitungan dengan baik.					
No.	Domain Kerja	Indikator Penilaian	Deskripsi	1	2	3	4	5
5.	Projek	Kelancaran	Secara keseluruhan proyek telah disusun, disajikan, dan disampaikan dengan lancar tanpa hambatan serta sudah sesuai dengan sistem perhitungan APBN dan APBD yang berlaku.					
		Keaslian	Secara keseluruhan proyek telah dilaksanakan dengan cara penyusunan, penyajian, maupun presentasi yang tidak dilakukan oleh orang lain baik dari segi isi maupun bahasa.					
		Keluwesan	Secara keseluruhan proyek telah dilaksanakan dengan luwes sehingga tampilan, isi, dan bahasa bisa dipahami dengan baik.					

		Pengembangan	Elaborasi telah dilaksanakan sejak awal penyusunan projek dan perhitungan data APBN dan APBD telah dielaborasi secara sistematis berdasarkan aturan yang berlaku.					
--	--	--------------	---	--	--	--	--	--

Skala

5 = Sangat Baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Buruk

1 = Sangat Buruk

Lampiran 9. Data Nilai Post-Test

Keterampilan Berpikir Kritis		Keterampilan Berpikir Kreatif	
Kelompok Kontrol	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol	Kelompok Eksperimen
80	78	80	78
83	80	83	84
82	83	82	83
77	83	77	83
83	80	83	84
75	70	75	70
77	78	77	78
75	75	70	75
75	76	70	76
81	84	81	84
79	80	70	84
87	84	87	84
86	78	84	78
77	70	70	78

86	80	84	84
75	78	70	78
75	70	75	78
86	80	84	84
83	70	83	75
86	77	84	70
86	78	84	78
84	80	84	84
75	70	84	84

Lampiran 10. Hasil Uji SPSS

A. Uji Normalitas Keterampilan Berpikir Kritis

	Kelompok Peserta didik	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statisti c	Df	Sig.	Statisti c	df	Sig.
Nilai Tes Berpikir Kritis	Kontrol	.248	23	.001	.869	23	.06
	eksperimen	.221	23	.005	.898	23	.024

a. Lilliefors Significance Correction

B. Uji Homogenitas Keterampilan Berpikir Kritis

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Nilai Tes Berpikir Kritis	Based on Mean	.283	1	44	.597
	Based on Median	.289	1	44	.594
	Based on Median and with adjusted df	.289	1	43.995	.594
	Based on trimmed mean	.273	1	44	.604

c. Hasil Analisis Deskriptif Keterampilan Berpikir Kritis

Nilai Berpikir Kritis	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
kontrol Grup	23	81.22	2.66	.111	70.41	71.34	75	86
Eksperimen Grup	23	84.91	3.78	.137	70.97	71.81	77	92
Total	46	82.37	3.21	.178	71.00	74.74	70	84

d. Hasil Uji Anova Keterampilan Berpikir Kritis (One-Way Anova)

ANOVA					
Nilai Berpikir Kritis					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	46.000	1	46.000	11.316	.002
Within Groups	178.870	44	4.065		
Total	224.870	45			

e. Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif

	Kelompok Peserta didik	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai Berpikir Kreatif	kontrol Grup	.273	23	.000	.860	23	.018
	Eksperimen Grup	.264	23	.000	.861	23	.018

a. Lilliefors Significance Correction

f. Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir Kreatif

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Nilai Berpikir Kreatif	Based on Mean	.073	1	44	.788
	Based on Median	.025	1	44	.875
	Based on Median and with adjusted df	.025	1	43.956	.875
	Based on trimmed mean	.070	1	44	.793

g. Hasil Analisis Deskriptif Keterampilan Berpikir Kreatif

Nilai Berpikir Kreatif	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
kontrol Grup	23	77.48	4.64	.256	80.82	81.94	70	84
Eksperimen Grup	23	80.00	3.95	.265	80.84	81.88	70	84
Total	46	78.74	4.30	.182	81.00	81.74	70	84

h. Hasil Uji Anova Keterampilan Berpikir Kreatif (One-Way Anova)

ANOVA					
Nilai Berpikir Kritis					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	128.891	1	128.891	7.598	.008
Within Groups	746.435	44	16.964		
Total	875.326	45			

i. Hasil Uji Manova (Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif)

Multivariate Testsa						
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	1.000	109717.912b	2.000	43.000	.000
	Wilks' Lambda	.000	109717.912b	2.000	43.000	.000
	Hotelling's Trace	5103.159	109717.912b	2.000	43.000	.000
	Roy's Largest Root	5103.159	109717.912b	2.000	43.000	.000
Model	Pillai's Trace	.001	.020b	2.000	43.000	.006

Pembelajaran	Wilks' Lambda	.999	.020b	2.000	43.000	.006
	Hotelling's Trace	.001	.020b	2.000	43.000	.006
	Roy's Largest Root	.001	.020b	2.000	43.000	.006
a. Design: Intercept + Kelompok						
b. Exact statistic						

J. Hasil Uji Efek Antar Subjek

Tests of Between-Subjects Effects						
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Nilai Berpikir Kritis	.348 ^a	1	.348	.029	.865
	Nilai Berpikir Kreatif	.022 ^b	1	.022	.014	.907
Intercept	Nilai Berpikir Kritis	289937.043	1	289937.043	24410.673	.000
	Nilai Berpikir Kreatif	304566.283	1	304566.283	195076.632	.000
Model Pembelajaran	Nilai Berpikir Kritis	.348	1	.348	.029	.000
	Nilai Berpikir Kreatif	.022	1	.022	.014	.000
Error	Nilai Berpikir Kritis	522.609	44	11.877		
	Nilai Berpikir Kreatif	68.696	44	1.561		
Total	Nilai Berpikir Kritis	290460.000	46			
	Nilai Berpikir Kreatif	304635.000	46			
Corrected Total	Nilai Berpikir Kritis	522.957	45			
	Nilai Berpikir Kreatif	68.717	45			
a. R Squared = .001 (Adjusted R Squared = -.022)						
b. R Squared = .000 (Adjusted R Squared = -.022)						